



**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**  
Nomor: 024.243/A/GPM/FEB-UNP-Kd/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Faisol, M.M.  
NIDN : 0712046903  
Jabatan : Gugus Penjamin Mutu

Menyatakan bahwa:

Nama : Zulfiana Ayu Rahma  
NPM : 2012020125  
Program Studi : SI Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2020-2022

Telah melakukan cek plagiasi pada dokumen Skripsi dengan hasil sebesar  $\leq 30\%$  dan dinyatakan bebas dari unsur-unsur plagiasi. (Ringkasan hasil plagiasi terlampir)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 29 Juli 2024  
Gugus Penjamin Mutu,



# Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2020-2022

*by Amal Fiaz*

---

**Submission date:** 01-Jul-2024 10:44AM (UTC+0500)

**Submission ID:** 2411066377

**File name:** ZULFIANA\_AYU\_RAHMA\_1.docx (1.24M)

**Word count:** 13698

**Character count:** 93498

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan nasional ialah aktivitas yang memiliki tujuan dalam rangka memajukan kemakmuran masyarakatnya termasuk kesejahteraan dalam segi material dan spiritual bangsa (Igir et al., 2018). Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara tepat, proporsional, selaras, dan terarah sehingga dapat bermanfaat di segala aspek. Pemerintah pusat terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah berdasarkan penentuan berbagai kebijakan. Pemerintah pusat harus terus mengupayakan secara optimal agar prioritas pembangunan daerah selaras dengan potensi daerahnya masing-masing.

Pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah yang berarti Pemerintah pusat memberikan kekuasaan dan otoritas terhadap masing-masing wilayah sehingga mampu menyelesaikan serta mengurus urusan daerahnya sendiri. Selaras berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat mengharapkan supaya pemerintah daerah mampu mengatur serta menggali berbagai potensi yang dapat bermanfaat khususnya untuk pendanaan pemerintah dan pembangunan wilayah masing-masing melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang berasal dari wilayahnya masing-masing (Hafandi, 2020). Sebagai usaha untuk mengembangkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah diharuskan agar mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, terutama yang mempunyai kemampuan untuk

menambah Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah yang tinggi menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfungsi untuk mendanai aktivitas pemerintahan dan program pemerintah daerah meliputi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan berbagai program pemerintahan lainnya.

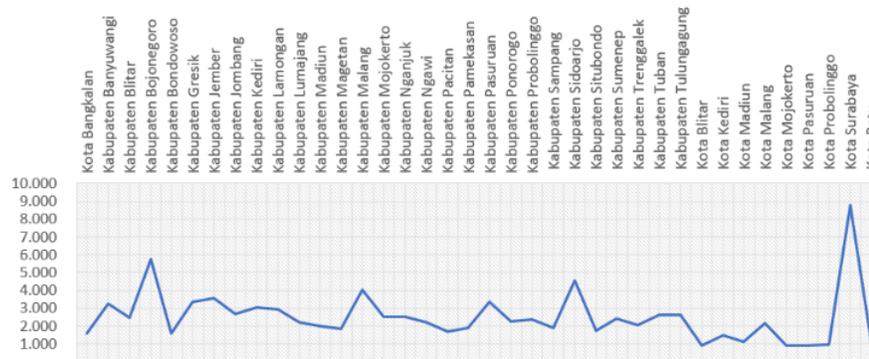
<sup>3</sup> Menurut UU No. 1 tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh melalui beberapa sumber. Yaitu <sup>56</sup> 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah. Pajak Daerah adalah pembayaran yang harus dibayarkan oleh penduduk maupun badan pada pemerintah daerahnya berdasarkan ketentuan hukum tanpa memperoleh timbal balik langsung, dan dana yang terkumpul digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk sebanyak mungkin (Patar et al., 2023). Sedangkan Retribusi Daerah ialah kontribusi yang dibayarkan oleh masyarakat pada pemerintah daerah sehubungan dengan layanan atau izin yang diperoleh. (Ramot Hutagalung et al., 2023). Kekayaan daerah yang dipisahkan ialah <sup>14</sup> kekayaan daerah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mengelolanya. Sedangkan yang dimaksud dengan <sup>11</sup> lain-lain PAD yang sah ialah seluruh penerimaan wilayah yang bukan bagian objek pajak daerah, retribusi daerah, maupun kekayaan daerah yang dipisahkan.

Selain itu terdapat indikator-indikator lain yang mempunyai dampak pada pertumbuhan PAD yaitu indikator Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita. Jumlah penduduk merupakan faktor yang memiliki hubungan erat dengan PAD. Jumlah penduduk yang kian meningkat menandakan bahwa

penduduk yang bekerja juga semakin meningkat. Meningkatnya jumlah tenaga kerja akan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi penduduk yang akan berpotensi memiliki dampak pada Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pendapatan Perkapita ialah pendapatan yang mengindikasikan rata-rata yang diperoleh oleh penduduk suatu wilayah atau menunjukkan tingkat pendapatan kelompok tertentu dalam suatu wilayah atau daerah N. Sari & Yunani, (2020). Pendapatan perkapita merupakan indikator penting dalam menganalisis ekonomi dan pengukuran kesejahteraan sosial penduduk dalam suatu wilayah. Pendapatan perkapita yang tinggi menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat dalam suatu wilayah. Ketika tingkat konsumsi masyarakat bertambah, maka akan memengaruhi tingkat konsumsi barang dan jasa. Tingkat permintaan yang tinggi berpotensi mendorong penghasil dalam meningkatkan produksi barang dan jasa untuk memenuhi keperluan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan peningkatan dalam hal pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat dapat mendorong PAD.

<sup>9</sup> Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang mempunyai kabupaten dan kota paling banyak di Indonesia ([www.dataindonesia.id](http://www.dataindonesia.id)). Seiring dengan hal itu, Pendapatan Asli Daerah serta realisasinya juga harus selaras agar mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Provinsi Jawa Timur terus berusaha untuk mengoptimalkan <sup>108</sup> kemandirian daerah melalui pengembangan Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten dan kota masing-masing. Peningkatan <sup>9</sup> PAD yang tinggi merupakan hal yang diharapkan oleh setiap kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintah pada daerah tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Pratama, (2021) yang menyatakan bahwa penerimaan PAD merupakan cerminan kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pengeluaran daerah. Kabupaten dan kota yang mempunyai PAD yang tinggi dimungkinkan akan lebih mudah untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi dan pemerintahan di daerah tersebut. Namun, untuk mencapai PAD yang tinggi tersebut masih menjadi tantangan bagi beberapa wilayah **Kota atau Kabupaten di Jawa Timur**. Hal tersebut sebagaimana diperoleh dari hasil data berikut.



Sumber : DJPK Kemenkeu, data diolah

23

**Gambar 1.1**

### **Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2022**

**Gambar** tersebut menggambarkan perkembangan PAD **Kota dan Kabupaten di Jawa Timur** yang menunjukkan adanya ketimpangan/gap. Beberapa wilayah memiliki PAD diatas rata-rata seperti ditunjukkan oleh kota Surabaya yang memperoleh PAD sebesar Rp 8.791.308.000. Sebaliknya,

62

terdapat beberapa daerah lain yang memiliki PAD dibawah rata-rata seperti diperoleh oleh Kota Pasuruan yang memperoleh PAD sebesar Rp 911.656.000. Hal tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat perbedaan/gap dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah pada masing-masing Kota dan Kabupaten. Apabila ketimpangan tersebut terus menerus terjadi maka akan memengaruhi kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Gap yang semakin tinggi, berpotensi meninggikan pula tantangan yang dihadapi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang rendah. Untuk itu menjadi penting untuk dikaji dan diamati faktor apa yang dapat mempengaruhi gap tersebut agar dapat menurun.

Terdapat beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan tentang indikator-indikator yang memengaruhi <sup>44</sup> Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut disampaikan pada <sup>penelitian</sup> oleh Kencana et al., (2022) yang menyebutkan bahwa indikator <sup>13</sup> Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan <sup>pajak daerah dan retribusi daerah</sup> yang semakin meningkat tentunya akan memengaruhi peningkatan <sup>1</sup> Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut sesuai dengan observasi Sari et al., (2022) yang menyebutkan <sup>19</sup> jika Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh terhadap PAD.

Beberapa kajian lain mengenai indikator-indikator yang berpengaruh terhadap PAD juga disampaikan oleh Oktiani, (2021) yang menyebutkan jika faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah salah satunya adalah faktor Jumlah Penduduk. Hasil observasi menyatakan jika <sup>18</sup> Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah. Jumlah Penduduk yang

meningkat tentunya akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan ekonomi yang juga ikut meningkat. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap peningkatan PAD. Penelitian lain terkait indikator yang memengaruhi PAD juga disampaikan oleh Mahfudh et al., (2021). Penelitian tersebut menyampaikan jika <sup>111</sup> Pendapatan Per kapita berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan perkapita yang tinggi pada suatu wilayah akan berakibat <sup>33</sup> pada daya beli masyarakat yang tinggi pula. Hal tersebut akan mendorong konsumsi lokal dan investasi usaha. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan PAD melalui aktivitas ekonomi.

Namun, selaras dengan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian yang mengatakan sebaliknya seperti penelitian Patar et al., (2023) yang memuat <sup>2</sup> bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. terdapat observasi lain yang menyatakan sebaliknya dengan penelitian diatas seperti yang disampaikan oleh Hendri Saldi et al., (2021) yang menyampaikan apabila faktor <sup>120</sup> Jumlah Penduduk tidak mempunyai pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. Seiring dengan hal itu <sup>133</sup> penelitian lain juga dilakukan oleh Igir et al., (2018) yang menyampaikan apabila Pendapatan Perkapita berpengaruh positif <sup>92</sup> tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari hasil beberapa riset tersebut masih memperlihatkan adanya ketidak konsistenan terkait sumber-sumber pendapatan asli daerah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa indikator <sup>28</sup> Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Perkapita memiliki dampak penting dalam

perkembangan PAD. Namun, beberapa penelitian lain menyampaikan bahwa <sup>28</sup> Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita tidak berperan penting terhadap perkembangan PAD.

Sehingga berkaitan dengan fenomena tersebut perlu dilaksanakan pengkajian lebih lanjut terkait fenomena indikator-indikator <sup>6</sup> yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melengkapi celah beberapa hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hal tersebut, judul yang diambil dalam <sup>25</sup> penelitian ini adalah “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2020-2022”

## B. Identifikasi Masalah

<sup>17</sup> Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan jika Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan Perkapita masyarakat merupakan indikator penting dan cukup mempunyai dampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). maka, masalah yang muncul adalah terkait ketidak konsistenan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan ketidakpastian berkaitan dengan indikator-indikator yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

## C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih konsisten dan tidak memunculkan interpretasi baru, sehingga diperlukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini digunakan agar penelitian mampu dilakukan lebih cermat serta teliti. <sup>81</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pembatasan masalah penelitian ini yaitu :

- <sup>26</sup> Penelitian ini membahas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi dan Pendapatan Perkapita serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- <sup>40</sup> Lokasi yang digunakan sebagai objek penelitian ialah Pemerintahan Kota dan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2022

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, fenomena yang dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022?
2. Bagaimana Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022?
3. Bagaimana Pengaruh Demografi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022?
4. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022?
5. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022?

#### E. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai :

1. Untuk melakukan analisis dampak secara parsial dari Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2022.
2. Untuk melakukan analisis dampak secara parsial dari Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2022.

3. Untuk melakukan analisis dampak secara parsial dari Demografi pada <sup>9</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2022.
4. Untuk melakukan analisis dampak secara parsial dari Pendapatan Perkapita pada <sup>9</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2022.
5. Untuk melakukan analisis dampak secara simultan <sup>2</sup> dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan Perkapita pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020-2022.

## <sup>1</sup> F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat secara praktis maupun teoritis bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil observasi ini ditujukan sebagai sumber informasi dan wawasan terkait <sup>121</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya wilayah Kota atau Kabupaten di Jawa Timur. Selain itu observasi ini dimungkinkan dapat menjadi sumber referensi dan bacaan baru yang akan memberikan informasi terkait bagaimana dampak <sup>9</sup> Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada rentang waktu <sup>44</sup> 2020-2022.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Observasi ini dimungkinkan memberikan manfaat pada pemerintah agar pemerintah dapat selalu berkomitmen untuk menjaga kestabilan dan meningkatkan PAD. Di samping itu, melalui observasi ini pemerintah diharapkan mampu untuk terus berupaya mengelola dan meningkatkan pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan berdampak pada perkembangan PAD.

### b. Bagi Masyarakat

Melalui observasi ini dimungkinkan mampu menambah pemahaman dan ketaatan masyarakat untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditentukan oleh daerahnya masing-masing. Iuran dari Pajak dan Retribusi tentunya dapat bermanfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Manfaat pembayaran tersebut nantinya juga akan dirasakan oleh masyarakat kembali.

## KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

## A. Kajian Teori

1. <sup>9</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdullah & Halim, (2016) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang didapatkan melalui berbagai sumber penerimaan di wilayahnya serta diatur sesuai undang-undang.” PAD berperan dalam memberikan sumber pembiayaan sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar pada kemampuan ekonomi daerahnya. <sup>24</sup> “Pendapatan Asli Daerah atau PAD yaitu penerimaan yang dihasilkan oleh wilayah melalui pengenaan <sup>129</sup> Pajak dan Retribusi berdasarkan undang-undang yang berlaku” (Oktiani, 2021)

Menurut Ramdani et al., (2021) <sup>27</sup> “Pendapatan Asli Daerah ialah penerimaan yang dikelola pemerintah daerah sebagai modal dalam mendukung pembangunan serta berbagai usaha daerah sehingga menyebabkan daerah lebih mandiri.” PAD harus dikelola dengan baik agar terus meningkat sehingga daerah dapat menanggung sebagian biaya untuk mengoperasikan pemerintahan daerah serta menjalankan pembangunan yang merata pada daerahnya.

a. <sup>1</sup> Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah dapat diperoleh melalui :

<sup>105</sup>  
**1) Pajak Daerah**

Menurut Mulatsih et al., (2022), “Pajak Daerah merupakan pembayaran yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara tanpa mendapat imbalan langsung.”

Dalam hal ini, pungutan pajak daerah bersifat memaksa guna membiayai kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya untuk pembiayaan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana. Menurut PP No. 35 tahun 2023, <sup>91</sup> Pajak Daerah dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :

- a) Pajak Provinsi, adalah pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan kepala daerah dan dipakai bagi kebutuhan pembangunan wilayahnya sendiri.
- <sup>131</sup> b) Pajak Kabupaten/Kota, ialah pajak yang dikenakan berdasarkan penetapan kepala daerah.

**2) Retribusi Daerah**

<sup>74</sup> Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2012 disebutkan bahwa

Retribusi Daerah ialah pembayaran yang harus dibayarkan oleh masyarakat guna sebagai imbalan dikarenakan pemberian layanan atau izin yang secara khusus disediakan pemerintah sebagai bentuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Mulatsih et al., (2022)

Retribusi merupakan tarikan kepada masyarakat yang diberikan kepada negara sebagai bentuk pemberian balas jasa atas fasilitas, usaha ataupun pelayanan barang serta penerbitan izin dari negara kepada individu dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.

Berdasarkan Pergub Prov. Jatim No. 24 Tahun 2022<sup>23</sup> **Retribusi Daerah**

digolongkan menjadi 3 yaitu :

- (a) **Retribusi Jasa Umum**
- (b) **Retribusi Jasa Usaha**
- (c) **Retribusi Perizinan Tertentu**

### 3) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

<sup>76</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019,<sup>98</sup> kekayaan daerah yang dipisahkan adalah “pendapatan yang diperoleh pemerintah wilayah melalui aktivitas penanaman atau penyertaan modal daerah.”<sup>76</sup> Dalam hal ini BUMD memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian di daerah dimana modal dari BUMD sendiri baik sebagian maupun seluruhnya ialah kekayaan daerah yang dipisahkan dengan sifat meliputi :

- (a) Memberikan jasa
- (b)<sup>1</sup> **Menyelenggarakan kemanfaatan umum**
- (c) **Menghasilkan pendapatan atau laba**
- (d) **Mengembangkan perekonomian daerah**

BUMD sendiri dapat terbentuk menjadi beberapa macam seperti PDAM, BPD dan BPR.

### 4) **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2022,<sup>39</sup> lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ialah penerimaan

daerah yang tidak termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diuraikan sesuai objek, rincian objek, dan sub rincian objek berdasarkan kebijakan perundang-undangan.

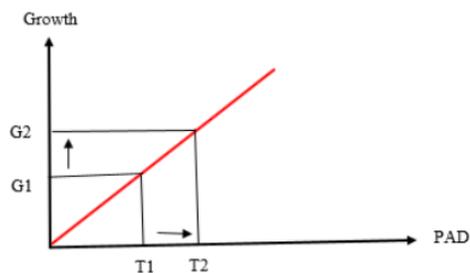
3

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

- (a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- (b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- (c) Hasil kerja sama daerah
- (d) Jasa giro
- (e) Hasil pengelolaan dana bergulir
- (f) Pendapatan bunga
- (g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah
- (h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, suransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah
- (i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- (j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- (k) Pendapatan denda pajak daerah
- (l) Pendapatan denda retribusi daerah

- (m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- (n) Pendapatan dari pengembalian
- (o) Pendapatan dari BLUD, dan
- (p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah dapat dikaitkan pada suatu teori yaitu teori pertumbuhan ekonomi. “Teori <sup>25</sup> pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa masyarakat sebagai akibat dari peningkatan aktivitas ekonomi..” (Sukirno, 2011)



Sumber : Makro Ekonomi Teori Pengantar, Sadono Sukirno

<sup>11</sup>  
**Gambar 2.2 Grafik Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori pertumbuhan ekonomi dalam konteks Pendapatan Asli Daerah berkaitan dengan rencana serta prosedur yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menumbuhkan Pendapatan Daerah melalui perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah akan menghasilkan peningkatan PAD. Suatu daerah yang mempunyai

pertumbuhan ekonomi yang kuat, dapat ditandai dengan tingginya produktivitas perusahaan. Perusahaan dengan tingkat produktivitas yang meningkat akan memberikan kesempatan kerja. Tingginya kesempatan kerja berkemungkinan memiliki dampak pada berkurangnya pengangguran. Tingkat pengangguran yang terus berkurang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Sehingga hal tersebut akan memengaruhi tingkat aktivitas konsumsi dan investasi yang kemudian hal tersebut akan memengaruhi tingkat pendapatan <sup>36</sup> Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang tentunya hal ini dapat memiliki dampak terhadap penerimaan PAD.

## 2. <sup>1</sup> Pajak Daerah

Pajak daerah ialah bagian pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pengembangan yang ada di wilayah tersebut.

<sup>16</sup> Menurut UU No 1 Tahun 2022,

“Pajak daerah yaitu kewajiban pembayaran yang ditarik pemerintah daerah yang harus diserahkan individu maupun badan sesuai peraturan Undang-Undang tetapi tidak merasakan imbalannya secara langsung dan difungsikan bagi kepentingan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.”

Sedangkan menurut Patar et al., (2023),

“Pajak daerah yaitu pembayaran yang harus dibayarkan oleh seseorang atau organisasi pada pemerintah daerah sesuai ketentuan hukum tanpa memperoleh imbalan langsung, dan dana yang terkumpul digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk sebanyak mungkin.”

### a. Fungsi Pajak

Menurut Agung, (2014), bahwa fungsi dari pajak diantaranya adalah :

- 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), hal ini berarti pajak digunakan untuk sumber pendapatan dalam mendukung pengeluaran pemerintah.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regulered*), hal ini berarti pajak berperan sebagai instrument pengatur dalam implementasi kebijakan sosial dan ekonomi.

### b. Jenis-jenis pajak

Menurut UU No. 1 Tahun 2022, jenis pajak dikelompokkan menjadi 2 kelompok sebagai berikut :

- 1) Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah provinsi terdiri dari :
  - (a) Pajak Kendaraan Bermotor
 

Objek dari PKB ialah kendaraan bermotor yang harus didaftarkan di daerah provinsi sesuai dengan undang-undang.
  - (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 

Objek dari BBNKB ialah pelimpahan pertama pada kendaraan bermotor
  - (c) Pajak Alat Berat
 

Objek Pajak Alat Berat yaitu kepemilikan/penguasaan alat berat.
  - (d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek PBKB yaitu penyerahan BBKB dari pemasok kepada pelanggan kendaraan bermotor. Dalam hal ini yang diartikan sebagai penyedia BBKB ialah produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor.

(e) Pajak Air Permukaan

Objek pajak dalam hal ini yaitu penggunaan air permukaan.

(f) Pajak Rokok

Objek pajak rokok yaitu konsumsi rokok. Yang dimaksud sebagai kategori rokok mencakup sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk lain rokok yang dikenakan cukai.

(g) Opsen pajak MBLB

Pajak ini dipungut oleh provinsi berdasarkan pokok pajak MBLB dan disesuaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Objek dari Opsen pajak MBLB ialah aktivitas yang melibatkan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

2) Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota mencakup :

(a) Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan.

Objek dari PBB-P2 adalah tanah serta bangunan yang dimanfaatkan individu/badan. Pengenaan pajak dikecualikan kepada wilayah yang diperuntukkan sebagai tempat usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(b) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan.

Objek pajak BPHTB ialah penerimaan kepemilikan terkait tanah dan bangunan. Penerimaan kepemilikan bisa diperoleh melalui beberapa cara yaitu penjualan, pertukaran, pemberian, waris, penggabungan usaha, dan sebagainya.

59

(c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Objek dari PBJT adalah penjualan maupun penggunaan barang serta jasa tertentu, seperti makanan dan minuman, listrik, hotel, parkir, seni, dan hiburan.

36

(d) Pajak Reklame

Reklame papan, billboard, videotron, reklame kain, selebaran, dan lainnya termasuk dalam kategori pajak reklame. Reklame yang disiarkan melalui internet, televisi, radio, dan media lainnya adalah pengecualian dari objek pajak reklame. Selain itu, iklan yang disiarkan pemerintah juga dikecualikan.

35

(e) Pajak Air Tanah

Objek dari pajak air tanah yaitu kegiatan pengambilan maupun pemakaian air tanah. Dalam hal ini terdapat beberapa pengambilan yang menjadi pengecualian dari objek pajak air tanah diantaranya penggunaan untuk kebutuhan rumah tangga, pengairan, pertanian, perikanan, dan peternakan masyarakat., untuk kegiatan kagamaan, dan kegiatan lain yang diatur oleh Pemda.

(f) <sup>17</sup> Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Aktivitas pengambilan batu-batu (seperti asbes, batu tulis, batu setengah pertama, kapur, apung, permata, garam batu, grafit, gips, granit, dan lain-lain) dikategorikan sebagai <sup>67</sup> objek pajak MBLB. Kegiatan pengambilan MBLB yang dimaksudkan untuk kebutuhan rumah tangga, keperluan pemasangan tiang listrik/telepon dan tidak untuk diperjual belikan maka dikecualikan dari pajak MBLB.

(g) <sup>93</sup> Pajak Sarang Burung Walet

Objek dari Pajak Sarang Burung Walet yaitu aktivitas pemanfaatan maupun pengelolaan <sup>1</sup> sarang burung walet. Sarang burung walet yang sudah disetor kepada penerimaan negara sebagai bukan pajak dikecualikan dari objek pajak ini.

<sup>18</sup> (h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

(i) Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### 3. Retribusi Daerah

<sup>6</sup> Salah satu komponen yang diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu <sup>3</sup> Retribusi Daerah. UU No 1 Tahun 2022 menyebutkan jika Retribusi Daerah ialah biaya yang dikenakan pemerintah setempat sebagai imbalan untuk layanan tertentu maupun perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan oleh seseorang atau organisasi.

Kebijakan terkait Pajak dan Retribusi daerah diatur sesuai prinsip demokrasi, kesetaraan, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Dalam hal tersebut harus mempertimbangkan terkait kemampuan wilayahnya. “Retribusi daerah yaitu iuran daerah yang dikenakan pemerintah setempat pada perorangan atau badan dalam rangka penyediaan dan pemberian jasa maupun izin tertentu” (Patar et al., 2023)

DJKP Kemenkeu menyebutkan, Retribusi Daerah ialah imbalan<sup>1</sup> yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah daerah atas layanan langsung atau izin yang diperoleh. .<sup>6</sup> Retribusi Daerah tentunya berbeda dengan Pajak Daerah. Retribusi Daerah hanya bisa dipungut ketika pemerintah daerah secara langsung sudah memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini berbeda dengan pengenaan pajak daerah. Pajak daerah dikenakan atau dipungut tidak didasarkan pelayanan langsung, sedangkan retribusi daerah hanya akan dipungut ketika telah dilakukan suatu pelayanan atau perizinan. Daerah secara khusus diberikan wewenang untuk menarik Pajak serta Retribusi Daerah yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah. Setiap wilayah juga memiliki wewenang untuk menentukan jenis retribusi yang tidak tercantum dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah sebagai dasar pedoman kemudian bertugas untuk menetapkan ketentuan yang lebih rinci terkait objek, subjek, dan dasar pengenaan jenis<sup>57</sup> retribusi yang dapat dikenakan oleh daerah.

#### **a. Subjek, Objek, dan Wajib Retribusi Daerah**

Menurut PP No 35 Tahun 2023, Objek dari Retribusi Pajak di golongkan menjadi 3 sebagai berikut :

<sup>79</sup>  
1) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum ialah layanan pemberian oleh pemerintah daerah untuk keperluan serta manfaat bersama serta mampu digunakan oleh seluruh individu ataupun kelompok.

Subjek Retribusi Jasa umum yaitu individu maupun organisasi dengan memanfaatkan <sup>57</sup> pelayanan jasa umum.

Wajib Retribusi Jasa umum yaitu individu maupun organisasi yang diwajibkan undang-undang untuk membayar retribusi atas <sup>75</sup> pelayanan jasa umum.

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha yaitu layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari bidang swasta.

Subjek Retribusi jasa usaha yaitu individu dan organisasi yang memanfaatkan layanan jasa usaha.

Wajib Retribusi Jasa Usaha ialah individu maupun organisasi yang diwajibkan berdasarkan undang-undang untuk membayar <sup>37</sup> retribusi atas pelayanan jasa usaha.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Aktivitas pemberian izin yang dijalankan oleh pemerintah pada seseorang maupun kelompok yang ditujukan untuk membina,

mengatur, melakukan pengontrolan dan pemantauan terhadap aktivitas, penggunaan lahan, sumber daya alam, infrastruktur, atau sarana tertentu untuk keperluan masyarakat serta lingkungan.

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu individu maupun organisasi yang memanfaatkan perizinan yang diberikan

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah individu atau organisasi yang berdasarkan undang-undang diharuskan membayar retribusi atas izin tertentu yang diberikan.

## **b. Jenis Pelayanan Retribusi Daerah**

### **1) Retribusi Jasa Umum**

Pelayanan yang dikategorikan sebagai objek ini yaitu :

#### **(a) Pelayanan Kesehatan**

Layanan ini meliputi layanan kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, serta fasilitas kesehatan serupa yang mempunyai maupun diatur oleh Pemerintah Daerah, terkecuali layanan administratif.

#### **(b) Pelayanan Kebersihan**

Layanan ini mencakup pengambilan sampah dari tempat asalnya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari asalnya atau tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan sampah akhir, pengadaan tempat pembuangan

maupun pengolahan atau penghancuran akhir sampah, serta pemrosesan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pengadaan layanan parkir di lokasi yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

(d) Pelayanan pasar

Pelayanan pada bagian ini termasuk penyediaan fasilitas pasar tradisional, meliputi area terbuka serta kios yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

(e) Pengendalian lalu lintas

Pengaturan terkait pemanfaatan ruas jalan, koridor, maupun kawasan tertentu dalam suatu kondisi oleh pengendara kendaraan bermotor.

2) Retribusi Jasa Usaha

Sebagaimana diatur oleh PP Nomor 35 tahun 2023, objek Retribusi jasa usaha mencakup :

(a) Penyediaan lokasi untuk aktivitas usaha seperti pasar grosir, toko, serta tempat aktivitas usaha lainnya. Dalam hal ini meliputi penyediaan sarana pasar grosir, serta toko-toko yang disewakan atau diatur Pemerintah Daerah.

(b) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan meliputi sarana lain pada lingkungan tempat pelelangan. lokasi pelelangan yang dikenakan pungutan

retribusi merupakan lokasi pelelangan yang disewa Pemerintah Daerah dan digunakan menjadi tempat pelelangan.

- (c) <sup>49</sup> Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Meliputi area parkir khusus di luar badan jalan yang disiapkan maupun diatur oleh Pemerintah Daerah.
- (d) <sup>17</sup> Penyediaan tempat penginapan atau pesanggarahan/villa. Meliputi tempat penginapan, pesanggarahan atau villa yang <sup>1</sup> disiapkan, dimiliki, maupun diatur Pemerintah Daerah.
- (e) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak. Dalam hal ini yaitu layanan pengadaan sarana pemotongan hewan ternak mencakup pengecekan <sup>116</sup> kesehatan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong yang diatur Pemerintah Daerah.
- (f) Pelayanan jasa kepelabuhan. layanan ini ialah layanan kepelabuhan yang dipunyai ataupun dimiliki Pemerintah Daerah.
- (g) <sup>49</sup> Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Meliputi lokasi rekreasi, pariwisata, serta olahraga yang dipunyai serta <sup>1</sup> diurus Pemerintah Daerah.
- (h) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air. Merupakan layanan penyeberangan barang ataupun orang yang memanfaatkan kendaraan di air milik Pemerintah Daerah.
- <sup>18</sup> (i) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (j) Penggunaan aset Daerah yang tidak menghambat pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi perangkat daerah, ataupun peningkatan pemanfaatan aset Daerah tanpa mengganti status kepemilikannya berdasarkan undang-undang.

### 3) Retribusi Perizinan <sup>41</sup> Tertentu

Jenis pelayanan pemberian izin tertentu yang termasuk objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

#### (a) Persetujuan bangunan Gedung

Persetujuan dalam hal ini termasuk dalam penerbitan persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat dari Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang. Bangunan yang memiliki status sebagai Bangunan yang dipunyai Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang berfungsi untuk keagamaan tidak dikenakan pungutan Retribusi.

#### (b) <sup>59</sup> Penggunaan tenaga kerja asing

Layanan untuk menyetujui rencana penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini pemanfaatan <sup>37</sup> tenaga kerja asing oleh lembaga pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan. Dan jabatan tertentu di lembaga Pendidikan merupakan pengecualian dari retribusi ini.

#### (c) Pengelolaan pertambangan rakyat

Pendampingan serta pemantauan pada pemilik izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah.

### c. Tarif Retribusi Daerah

Berdasarkan PP Nomor 35 tahun 2023 prinsip dan sasaran retribusi daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tarif **Retribusi Jasa Umum** ditentukan menurut pertimbangan biaya terkait pengadaan layanan tersebut, kemampuan masyarakat, keadilan, dan efisiensi pengelolaan layanan tersebut. Biaya ini mencakup biaya operasional, biaya pemeliharaan, **bunga, dan modal**.
- 2) Tarif **Retribusi Jasa Usaha** dilandaskan terhadap **tujuan** dalam rangka mendapatkan **keuntungan yang layak**. **Keuntungan** ini didefinisikan sebagai hasil yang didapat ketika layanan tersebut dilaksanakan dengan efisien dan mempertimbangkan harga pasar, serta biaya modal.
- 3) Tarif **Retribusi Perzinan Tertentu** dirancang untuk mengurangi sejumlah ataupun seluruh dana yang terkait dengan pengelolaan izin, seperti penerbitan perizinan, pemantauan lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, serta dampak biaya negatif terhadap perizinan.

## 4. Demografi

Menurut Daldjoeni, (1987)

Demografi berfungsi untuk mempelajari keadaan penduduk, statistik penduduk, serta perubahan kondisi masyarakat. Dalam hal ini keadaan penduduk meliputi jumlah, tingkat pertumbuhan, distribusi, kepadatan dan struktur, serta komposisi demografis populasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan “penduduk sebagai seluruh manusia yang berada pada wilayah <sup>65</sup> Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih serta yang bertempat tinggal kurang dari 6 bulan, namun memiliki tujuan menetap.”

<sup>63</sup> Jumlah penduduk merupakan jumlah keseluruhan seluruh individu yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Konsep ini merupakan salah satu aspek paling dasar dalam studi demografi dan memiliki pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kemasyarakatan termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konsep demografi, jumlah penduduk mencerminkan dinamika dan karakteristik populasi suatu daerah atau negara. Terdapat empat komponen yang memengaruhi jumlah penduduk menurut Lembaga Demografi Universitas Indonesia <sup>106</sup> yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk, migrasi keluar.

Pengukuran jumlah penduduk dapat dilakukan melalui sensus penduduk yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan jangka waktu tertentu. Pemahaman mengenai jumlah penduduk dan berbagai faktor yang memengaruhinya dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

## 5. Pendapatan Perkapita

“Pendapatan Perkapita ialah pendapatan yang mengindikasikan rata-rata yang diperoleh oleh masyarakat suatu negara atau menunjukkan tingkat pendapatan kelompok tertentu dalam suatu wilayah atau daerah” (N. Sari & Yunani, 2020). Menurut N. Sari & Yunani, (2020) ” Nilai pendapatan perkapita dalam suatu daerah dapat dihitung melalui pembagian antara PDRB terutama <sup>5</sup> PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan Jumlah Penduduk sehingga dapat diperoleh pendapatan perkapita riil masyarakat.”

<sup>66</sup> PDRB dibedakan menjadi 2 macam yaitu menurut harga berlaku dan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan nilai tambah produk maupun layanan <sup>13</sup> pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB menurut harga konstan menunjukkan nilai tambah produk maupun layanan jasa pada tahun dasar tertentu.

Menurut Muktar Redy Susila, (2019)

Apabila nilai PDRB tinggi, maka perekonomian daerah diartikan baik. Sebaliknya, jika nilai PDRB rendah, maka perekonomian di daerah tersebut dikatakan kurang baik. Perekonomian yang kurang baik menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di daerah tersebut kurang berkembang.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perekonomian yang tinggi, menandakan tinggi pula Pendapatan Perkapita masyarakat. Sebaliknya, perekonomian suatu daerah yang rendah, menandakan rendahnya Pendapatan Perkapita masyarakat. Pendapatan perkapita yang tinggi dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai bahwa masyarakat pada wilayah tersebut sejahtera. Kesejahteraan masyarakat yang tinggi, akan berpengaruh pada kondisi masyarakat di wilayah tersebut yang cenderung konsumtif.

Menurut Prasetyani & Sumardi, (2020) terdapat beberapa sektor penyusun PDRB, meliputi :

1. a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Pengadaan Listrik dan Gas
- e. Pengadaan Air
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
- h. Transportasi dan Pergudangan
- i. Penyediaan Akomodasi dan Komunikasi
- j. Informasi dan Komunikasi
- k. Jasa Keuangan
- l. Real Estate
- m. Jasa Perusahaan
- n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- o. Jasa Pendidikan
- p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q. Jasa Lainnya

Data PDRB memiliki peranan pokok dalam mengidentifikasi bagaimana keadaan serta perekonomian dalam suatu wilayah. PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat diketahui dengan cara

membagi jumlah penduduk wilayah dengan <sup>1</sup> nilai PDRB ADHB per satu orang penduduk. Ukuran tingkat kesejahteraan pada suatu wilayah dapat dihitung melalui PDRB ADHB ini. Sedangkan agar dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi perkapita suatu wilayah secara nyata dapat diketahui melalui PDRB ADHK.

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai hubungan <sup>36</sup> Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi dan Pendapatan Perkapita terhadap <sup>36</sup> Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil bervariasi yang diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil observasi yang dituliskan oleh <sup>7</sup> Alfandy Ferry Igir, Josep Bintang Kalang, <sup>7</sup> George M.V, Kawung dengan judul “<sup>29</sup> Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan” (2018) dengan menggunakan <sup>7</sup> metode analisis regresi berganda metode kuadrat terkecil (ordinary least squares). Hasil dari observasi ini adalah :
  - (1) <sup>31</sup> Pendapatan Perkapita berpengaruh positif pada <sup>31</sup> Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, hal tersebut dibuktikan oleh nilai koefisien regresi 0,163.
  - (2) <sup>7</sup> Belanja Daerah memiliki pengaruh signifikan pada <sup>7</sup> Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, dengan nilai koefisien regresi 1,981.

- (3) Secara simultan <sup>7</sup> Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan.
2. Hasil Penelitian lain juga dinyatakan oleh <sup>8</sup> Afti Sulastri, Maftukhin, <sup>50</sup> Azizah Indriani, Dumadi, Titi Rahmawati yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes” (2020). Teknik <sup>123</sup> yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. teknik penentuan sampel menggunakan *judgement sampling* dan memakai teknik analisa model regresi yang dihasilkan dari metode kuadrat terkecil. Hasil dari penelitian ini adalah :
- (1) <sup>8</sup> Secara parsial variabel pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah yang dilihat dari hasil uji t <sup>8</sup>  $18,437 > t$ -tabel 2,002 dan Sig. 0,000 < 0,05.
- (2) Secara parsial bahwa variabel retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan pada pendapatan asli daerah. Dilihat dari hasil uji t t-hitung 3,058 > t-tabel 2,002 dan sig-t 0,003 < 0,05.
- (3) Secara <sup>11</sup> simultan terdapat pengaruh signifikan pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah. uji F, F-hitung <sup>8</sup> 414,542 > F-tabel 3,16 dan F-sig 0,000 < 0,05 ,
3. Hasil penelitian selanjutnya dilakukan oleh Vinna Marlita Sari, Mar’atus Solikah, dan Sugeng (2022) yang berjudul <sup>2</sup> “Model Regresi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022.” Teknik yang dipakai

adalah pendekatan kuantitatif serta teknik regresi linear dengan memanfaatkan data sekunder yang didapatkan pada BPS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan :

- (1) Nilai Pajak Daerah menunjukkan  $0,000 < 1,98157$  dengan nilai t hitung  $16,350 > 1,98157$ . Artinya secara Parsial Pajak Daerah mempunyai pengaruh signifikan pada PAD.
  - (2) Nilai Retribusi Daerah menunjukkan  $0,000 < 0,05$  dengan nilai t hitung  $5,502 > 1,98157$  artinya secara Parsial Retribusi Daerah memiliki pengaruh signifikan pada PAD.
  - (3) Nilai Jumlah Penduduk menunjukkan  $0,000 < 0,05$  dengan Nilai t hitung  $4,643 < 1,98157$ . Artinya Jumlah Penduduk secara Parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.
  - (4) Nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dengan nilai F hitung  $473,805 > F$  tabel  $2,69$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara Simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD.
4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Afdhal Hendri Saldi, Zulgani, Nurhayani (2021) dengan judul “Analisis pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci”. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi analisis deskriptif serta pendekatan kuantitatif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini yaitu :

- (1) Variabel PDRB berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Kerinci.<sup>107</sup>
- (2) Jumlah penduduk tidak berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kerinci.<sup>68</sup>
5. Hasil penelitian oleh Darwin Damanik, dan Pawan Darasa Panjaitan (2022) dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar”. Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan beberapa analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah :
- (1) Retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan pada PAD di Kota Pematangsiantar.<sup>32</sup>
- (2) Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan pada PAD di Kota Pematangsiantar.<sup>32</sup>
6. Hasil penelitian yang dilakukan Elidawaty Purba dan Ekayanty Manurung (2023) dengan judul “Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar”. Observasi ini menggunakan pendekatan kuantitatif serta teknik analisis regresi berganda menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS). Dengan hasil penelitian :
- (1) Jumlah penduduk berpengaruh signifikan pada Pendapatan asli daerah.<sup>42</sup>
- (2) Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif namun tidak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah.<sup>25</sup>

7. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Simon Patar Rizki Manalu, Hilman Lubis, dan Oki Prayogi (2022) dengan judul "Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi". Metode analisis yang dilakukan pada observasi ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan memanfaatkan data sekunder yang didapatkan dari BPS Kota Medan. Hasil analisis ini menunjukkan :

- (1) diketahui bahwa  $df = 6$ . Dan berdasarkan  $df = 6$ , maka diketahui  $t$  tabel pada taraf signifikansi  $0.025 = 2.447$ . Karena nilai  $t$  hitung pajak daerah  $-2.257 < \text{nilai } t \text{ tabel } 2.447$  serta nilai signifikansi (Sig.)  $0.065 > \text{probabilitas } 0.05$ . Artinya, secara parsial Pajak Daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
- (2) Berdasarkan rumus derajat kebebasan residual ( $df$ ) = 6. Dan berdasarkan  $df = 6$ , maka diketahui  $t$  tabel pada taraf signifikansi  $0.025 = 2.447$ . Karena nilai  $t$  hitung retribusi daerah  $-0.059 < \text{nilai } t \text{ tabel } 2.447$  dengan nilai signifikansi (Sig.)  $0.955 > \text{probabilitas } 0.05$  Sehingga retribusi daerah secara parsial tidak mempunyai pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD).
- (3) Berdasarkan rumus derajat kebebasan residual ( $df$ ) = 6. Dan berdasarkan  $df = 6$ , maka diketahui nilai  $t$  tabel  $0.025 = 2.447$ . Karena  $t$  hitung pajak daerah  $0.297 < t \text{ tabel } 2.447$  dengan tingkat signifikansi (Sig.)  $0.777 > \text{probabilitas } 0.05$  sehingga, pajak daerah tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

(4) Diketahui nilai t tabel  $0.025 = 2.447$ . nilai t hitung  $-0.850 < t$  tabel  $2.447$  nilai signifikansi (Sig.)  $0.428 > \text{probabilitas } 0.05$ . sehingga, retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Alfandy Ferry Igir, Josep Bintang Kalang, George M.V. Kawung (2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”	X1 = Pendapatan Perkapita, X2 = Belanja Daerah, Y = Pendapatan Asli Daerah	analisis data model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan per kapita memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan pada PAD</li> <li>• Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah,</li> <li>• Pendapatan per kapita dan Belanja daerah berpengaruh simultan positif dan signifikan pada PAD Kabupaten Minahasa Selatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis data panel,</li> <li>• Tempat penelitian,</li> <li>• Tahun Penelitian</li> <li>• Variabel Penelitian</li> </ul>
	Afti Sulastri, Maftukhin, Azizah Indriani, Dumadi, Titi Rahmawa (2020) dengan judul	X1 = Pajak Daerah, X2 = Retribusi Daerah, Y = Pendapatan Asli Daerah	pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik penentuan sampel menggunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel Pajak Daerah secara parsial berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis data</li> <li>• Lokasi Penelitian</li> </ul>

<p>8 “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes”</p>		<p>judgement sampling serta memanfaatkan metode teknik uji regresi berganda</p>	<p>109 • Variabel retribusi daerah secara parsial mempunyai pengaruh signifikan pada PAD, • Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh signifikan pada PAD</p>	
<p>Vinna Marlita Sari, Mar'atus Solikah, Sugeng (2022) yang berjudul “Model Regresi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk Pada Provinsi Jawa Timur (2018-2020)”</p>	<p>3 X1 = Pajak Daerah, X2 = Retribusi Daerah, X3 = Jumlah Penduduk, Y = Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>teknik pendekatan Kuantitatif serta teknik regresi linier.</p>	<p>• Retribusi Daerah secara parsial berdampak signifikan pada PAD, • Jumlah Penduduk berdampak secara parsial serta signifikan pada PAD, • Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan jumlah penduduk berdampak signifikan pada PAD</p>	<p>• Analisis data • Tahun penelitian</p>
<p>Afdhal Hendri Saldi, Zulgani, Nurhayati dengan judul Analisis pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>X1 = PDRB X2 = Jumlah Penduduk Y = Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>teknik analisis regresi linier</p>	<p>• 128 ara parsial variabel PDRB mempunyai pengaruh signifikan pada PAD, • Secara parsial variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan pada PAD,</p>	<p>• Teknik analisis • Lokasi penelitian</p>

	Kabupaten Kerinci”			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara simultan variabel PDRB dan Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh signifikan pada PAD.</li> </ul>	
	<p>Darwin Damanik, Pawan Darasa Panjaitan (2022) dengan judul</p> <p>“Pengaruh Retribusi Daerah dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar”</p>	<p>X1 = Retribusi Daerah, X2 = Inflasi, Y = Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>pendekatan kuantitatif dengan metode Analisis Regresi Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Daerah berdampak signifikan pada PAD di Kota Pematangsiantar,</li> <li>• Inflasi berdampak tidak signifikan pada PAD di Kota Pematangsiantar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik analisis data</li> <li>• Lokasi penelitian</li> </ul>
	<p>Elidawaty Purba dan Ekayanty Manur (2023) dengan judul</p> <p>“Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar”</p>	<p>X1 = Jumlah Penduduk X2 = Pertumbuhan Ekonomi Y = Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis regresi berganda menggunakan teknik Ordinary Least Square (OLS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penduduk memiliki pengaruh pada PAD</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh pada PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik analisis data</li> <li>• Lokasi Penelitian</li> </ul>
	<p>Simon Patar Rizki Manalu, Hilman Lubis, Oki Pambayogi (2023) dengan judul</p> <p>“Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan</p>	<p>X1 = Pajak Daerah, X2 = Retribusi Daerah, Y1 = Pendapatan Asli Daerah Y2 = Pertumbuhan</p>	<p>teknik Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak daerah secara parsial tidak berdampak pada PAD Kota Medan Tahun 2013-2021,</li> <li>• Retribusi daerah secara parsial berdampak pada PAD Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik analisis data</li> <li>• Lokasi penelitian</li> </ul>

	<p><sup>25</sup>Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi”</p>	Ekonomi		<p>Medan tahun <sup>83</sup>13-2021,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kota Medan tahun 2013-2021,</li> <li>• Secara parsial Retribusi daerah tidak berdampak <sup>132</sup>a pertumbuhan ekonomi Kota Medan tahun 2013-2021,</li> <li>• <sup>70</sup>cara simultan Pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan tahun 2013-2021 Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonon<sup>6</sup>Kota Medan tahun 2013-2021</li> </ul>	
--	---	---------	--	---	--

Sumber : Data diolah 2023

### C. Kerangka Berpikir

#### 24 1. Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah ialah pembayaran yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah daerah sesuai peraturan daerah. Menurut Mulatsih et al., (2022) pajak daerah yaitu pungutan masyarakat kepada negara yang sifatnya wajib dan tidak mendapatkan timbal balik langsung. Sumber utama PAD merupakan Pajak Daerah.

Pajak daerah memiliki kaitan yang signifikan dengan PAD. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh V. M. Sari et al., (2022) yang menyatakan jika naiknya Pajak Daerah, akan menaikkan pula Pendapatan Asli Daerah. Serta menurunnya Pajak Daerah, menurunkan pula Pendapatan Asli Daerah.

#### 2. Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi daerah adalah bagian pendapatan daerah yang dikenakan berdasarkan pemanfaatan barang milik daerah maupun penyerahan izin tertentu. Ketika terdapat kenaikan Retribusi Daerah akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah.

Pernyataan lain disampaikan juga oleh Siahaan, (2016) yang menyatakan

Retribusi Daerah ialah biaya yang dikenakan oleh pemerintah setempat sebagai imbalan untuk layanan atau hak istimewa tertentu yang diserahkan kepada perusahaan maupun seseorang.

Selaras berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diambil pernyataan bahwa Retribusi Daerah mempunyai dampak positif pada PAD.

Meningkatnya pendapatan Retribusi Daerah akan berpotensi pada peningkatan PAD. Pernyataan ini sesuai berdasarkan penelitian yang disampaikan V. M. Sari et al., (2022) yang menyampaikan jika Retribusi daerah memiliki dampak signifikan pada PAD.

### 3. Hubungan Demografi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Demografi ialah ilmu terkait populasi manusia, termasuk distribusi, struktur, pertumbuhan, dan karakteristik demografis lainnya. Aspek jumlah penduduk dalam ilmu demografi memiliki hubungan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya masyarakat akan berpotensi pula <sup>87</sup> meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan retribusi. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dinyatakan oleh (Oktiani, 2021) yang menyebutkan pendapatan suatu wilayah dapat diperoleh dari aktivitas perekonomian penduduk seperti penarikan pajak, retribusi dan lain lain.

Suatu daerah dengan penduduk yang terlampau sedikit dimungkinkan tidak akan mampu untuk memanfaatkan sumber dayanya dengan efisien. Sebaliknya, apabila suatu daerah memiliki populasi penduduk yang tinggi dimungkinkan dapat memanfaatkan tanah ataupun modalnya dengan lebih efisien.

### 4. Hubungan Pendapatan Perkapita <sup>30</sup> terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan per kapita adalah ukuran kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Pendapatan perkapita dihasilkan dengan

membagi PDRB dan jumlah penduduk suatu wilayah. Tingginya Pendapatan Per kapita, akan berpengaruh pada tingginya kapasitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi , seperti kegiatan konsumsi. Ketika terdapat kenaikan jumlah konsumsi, maka menandakan adanya kenaikan jumlah permintaan. Jumlah permintaan yang tinggi akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produksinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah total barang/jasa dalam perekonomian akan meningkat. Ketika jumlah barang/jasa meningkat hal tersebut memungkinkan mendorong pendapatan pajak daerah maka PAD akan meningkat pula.

Pernyataan itu selaras dengan pernyataan yang disampaikan Zarkasi, Lidya (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan perkapita merupakan indikator penting bagi setiap wilayah, ketika pendapatan perkapita bertumbuh maka konsumsi masyarakat akan bertumbuh pula serta kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Berdasarkan pernyataan tersebut, <sup>21</sup> dapat diketahui jika Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan perkapita mempunyai kaitan yang positif. Naiknya pendapatan perkapita masyarakat dalam suatu wilayah, akan berakibat pada pendapatan asli daerahnya yang meningkat pula. Pernyataan tersebut selaras dengan observasi Mahfudh et al., (2021) yang menyampaikan jika pendapatan perkapita berpengaruh signifikan pada PAD. pendapatan perkapita yang tumbuh dengan trend positif berpotensi memiliki dampak pada peningkatan PAD.

## 5. Hubungan <sup>14</sup> Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi dan

### Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan Perkapita secara simultan berdampak <sup>6</sup> pada Pendapatan Asli Daerah. Artinya tinggi rendahnya variabel bebas tersebut dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana dijelaskan pada teori pengelolaan pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal. Ketika pemerintah mengeluarkan belanjanya dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. tingginya kegiatan ekonomi akan berdampak pula pada perkembangan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan Perkapita. Sehingga mampu mengakibatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pernyataan tersebut sebagaimana dijelaskan pada penelitian oleh Rizki et al., (2021) yang menyampaikan jika semakin tinggi jumlah pendapatan Retribusi Daerah, akan berdampak pula pada tingginya jumlah Pendapatan Asli Daerah. Penelitian lain yang dinyatakan oleh Elidawaty Purba & Manurung (2023) terkait dengan Hubungan variabel Demografi dengan Pendapatan Asli Daerah menyebutkan bahwa Jumlah penduduk mempunyai dampak signifikan pada PAD. Jumlah penduduk yang meningkat berpotensi menyebabkan peningkatan pula pada PAD.

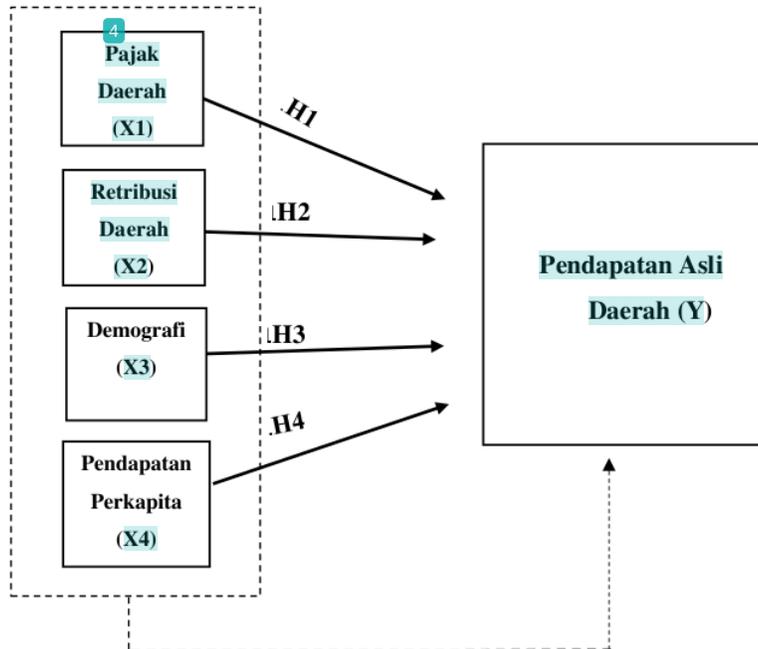
Penelitian Murib et al., (2018) terkait dengan hubungan Pendapatan Perkapita dengan Pendapatan Asli Daerah menyatakan bahwa wilayah

dengan peningkatan PAD yang baik memiliki kecenderungan tingkat pendapatan per Kapita yang baik pula.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa variabel-variabel tersebut berdampak secara simultan pada Pendapatan Asli Daerah.

#### D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebuah kerangka berpikir teoritis yang menjelaskan variabel yang diberikan sebelumnya melalui bagan berikut :



14  
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

#### Keterangan :

-  : Pengaruh secara parsial  
 : Pengaruh secara simultan

## E. HIPOTESIS

Menurut Sugiyono, (2019), “Hipotesis adalah solusi sementara atas rumusan masalah penelitian, yang disampaikan dalam bentuk pernyataan.”<sup>3</sup> Dikatakan sementara dikarenakan hasil yang disajikan hanya dilandaskan pada teori.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis seperti berikut :<sup>13</sup><sup>19</sup>

H1 : Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022.

H2 : Retribusi Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022.

H3 : Demografi memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022.<sup>10</sup>

H4 : Pendapatan Perkapita memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022.<sup>10</sup>

H5 : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan Perkapita secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022.<sup>2</sup><sup>13</sup>

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Variabel Penelitian

#### 1. Identifikasi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, (2019).

Variabel merupakan atribut maupun nilai dari individu, objek, maupun aktivitas yang mempunyai variasi tertentu yang diambil guna dipelajari peneliti sehingga memperoleh informasi tentang sesuatu dan kemudian diambil kesimpulan.

Pada observasi ini memuat dua variabel diantaranya variabel terikat (*dependent*) serta variabel bebas (*independent*) yaitu seperti dibawah ini :

##### a. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent*) ialah “variabel yang berpengaruh maupun yang mengakibatkan variasi maupun adanya variabel terikat (*dependent*)” (Sugiyono, 2019) . Variabel bebas pada observasi ini adalah :

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3 = Demografi

X4 = Pendapatan Perkapita

##### b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent*) ialah “variabel terpengaruh maupun yang merupakan hasil dari variabel bebas (*independent*)” (Sugiyono, 2019).

Variabel terikat pada penelitian ini adalah :

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## 2. Definisi Operasional Variabel

### a. Pajak Daerah (X1)

Berdasarkan <sup>16</sup> UU No 1 Tahun 2022,

“Pajak daerah yaitu kewajiban pembayaran yang ditarik pemerintah daerah yang harus diserahkan individu maupun badan sesuai peraturan Undang-Undang tetapi tidak merasakan imbalannya secara langsung dan difungsikan bagi kepentingan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.”

Perhitungan Pajak Daerah bisa dilakukan <sup>23</sup> dengan rumus berikut :

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP}$$

Data penerimaan Pajak Daerah dapat diperoleh melalui laporan realisasi APBD masing-masing daerah yang dapat dilihat melalui laman DJPK Kemenkeu ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)).

### b. <sup>3</sup> Retribusi Daerah (X2)

Menurut UU No 1 Tahun 2022 “Retribusi Daerah ialah biaya yang dikenakan oleh pemerintah setempat sebagai imbalan untuk layanan tertentu maupun perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan oleh seseorang atau organisasi.”

Perhitungan Retribusi Daerah dapat dilakukan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{DPP}$$

Pengumpulan data dapat mencakup pencatatan tahunan yang diperoleh melalui laporan realisasi APBD masing-masing daerah yang

dapat dilihat melalui laman DJPK Kemenkeu ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) untuk memastikan ketepatan dan keberlanjutan data.

c. Demografi (X3)

Menurut Daldjoeni, (1987)

Demografi berfungsi untuk mempelajari keadaan penduduk, statistik penduduk, serta perubahan kondisi masyarakat. Dalam hal ini keadaan penduduk meliputi jumlah, tingkat pertumbuhan, distribusi, kepadatan dan struktur, serta komposisi demografis populasi. Aspek mendasar dalam studi demografi adalah jumlah penduduk.

Jumlah Penduduk dapat dihitung melalui rumus berikut :

$$\text{Jumlah Penduduk} = \text{Penduduk Laki Laki} + \text{Penduduk Perempuan}$$

Metode pengumpulan data terkait jumlah penduduk dapat didapatkan melalui laman Badan Pusat Statistik ([www.bps.co.id](http://www.bps.co.id))

d. Pendapatan Per kapita (X4)

“Pendapatan Perkapita ialah pendapatan yang mengindikasikan rata-rata yang diperoleh oleh penduduk suatu wilayah atau menunjukkan tingkat pendapatan kelompok tertentu dalam suatu wilayah atau daerah” (N. Sari & Yunani, 2020). Pengumpulan data pendapatan perkapita dapat dilakukan dengan menghitung total pendapatan bruto suatu daerah dalam rentang waktu tertentu dan membaginya dengan jumlah penduduk wilayah tersebut pada saat bersamaan. Pendapatan perkapita dapat diperoleh melalui rumus berikut :

$$\text{Pendapatan Perkapita} = \text{PDRB Angka Konstan} : \text{Jumlah Penduduk}$$

88  
e. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Menurut Abdullah & Halim, (2016) Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah “pendapatan yang didapatkan melalui berbagai sumber penerimaan di wilayahnya serta diatur sesuai undang-undang.” PAD dapat dihitung melalui rumus berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Kekayaan Daerah Yang dipisahkan} + \text{Lain-Lain PAD yang sah}$$

Data dapat diperoleh melalui laporan APBD pada laman DJPK Kemenkeu ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id))

26  
**B. Pendekatan dan Teknik Penelitian**

**1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif.

Menurut (Sugiyono, 2019)

Metodologi yang dikenal sebagai pendekatan penelitian kuantitatif didasarkan pada positivisme. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan menghimpun data dengan alat penelitian, menganalisa data secara statistik, dan menerapkan hasilnya pada populasi uji atau sampel tertentu.

Peneliti memakai pendekatan kuantitatif untuk melihat signifikansi hubungan diantara variabel yang dianalisis. Selain itu, pendekatan kuantitatif dalam penelitian melibatkan pengumpulan serta analisa data

kuantitatif yang berupa angka dan statistik untuk menyusun, dan menguji hipotesis serta membuat generalisasi.

## 2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Teknik yang dipakai yaitu menggunakan teknik analisis kausal komparatif (*Causal-Comparative Research*).

Menurut Radjab, E., & Jam'an, (2017),

Penelitian kausal komparatif diartikan sebuah desain studi yang menunjukkan hubungan penyebab dan efek terhadap dua atau lebih variabel. Peneliti melakukan observasi pada dampak yang muncul serta mencari kembali fakta yang dinilai sebagai penyebabnya.

Teknik kausal komparatif yang digunakan bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena sebagai variabel yang dipengaruhi <sup>54</sup> yaitu Pendapatan Asli Daerah dengan variabel lain yang memengaruhi yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi dan Pendapatan per kapita.

<sup>27</sup>

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini diteliti pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan DJPK Kemenkeu yang datanya dapat diperoleh melalui *website* <https://jatim.bps.go.id/> yang mana merupakan situs resmi BPS Provinsi Jawa Timur dan <https://djp.kemenkeu.go.id/> yang menyediakan data terkait keuangan daerah. Dari kedua situs tersebut dapat diperoleh laporan

berupa data PDRB kabupaten/kota serta data realisasi APBD Kota atau Kabupaten

<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan pada Kota serta Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dikarenakan Jawa Timur tercatat memiliki jumlah Kota atau Kabupaten yang cukup banyak. Provinsi Jawa Timur juga tercatat memiliki pendapatan perkapita masyarakat yang cukup tinggi. <sup>1</sup> Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga terdapat banyak industri yang berpotensi menaikkan pendapatan asli daerah.

## 2. Waktu Penelitian <sup>10</sup>

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan dari bulan Januari hingga Juni 2024 <sup>62</sup> pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan periode selama 3 tahun mulai 2020-2023.

## <sup>24</sup> D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono, (2019) “populasi yaitu kumpulan umum dari objek atau subjek yang berciri khusus dan diatur peneliti untuk dipahami juga diambil kesimpulan.”

Populasi pada observasi ini ialah Kota dan Kabupaten <sup>62</sup> di Jawa Timur sebesar 38 Kabupaten dan kota.

### <sup>4</sup> 2. Sampel

“Sampel ialah anggota dari keseluruhan jumlah dan ciri-ciri yang dipunyai populasi” (Sugiyono, 2019). <sup>6</sup> Penentuan sampel penelitian ini

menggunakan metode sampling jenuh (sensus). Teknik ini ialah teknik penentuan sampel yang menggunakan semua bagian populasi untuk dipakai sebagai sampel.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui anggota sampel yaitu 38 Kabupaten/kota dengan waktu penelitian 3 tahun. Maka dapat diketahui keseluruhan pengamatan yang diteliti adalah  $38 \times 3 = 114$  sampel.

38 Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur yang dijadikan sampel penelitian diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Tabel Sampel Penelitian**

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kota Kediri	20	Kabupaten Jember
2	Kota Surabaya	21	Kabupaten Sumenep
3	Kabupaten Gresik	22	Kabupaten Blitar
4	Kabupaten Sidoarjo	23	Kabupaten Lamongan
5	Kabupaten Pasuruan	24	Kabupaten Probolinggo
6	Kota Malang	25	Kabupaten Lumajang
10	Kota Batu	26	Kabupaten Situbondo
8	Kabupaten Mojokerto	27	Kabupaten Magetan
9	Kota Madiun	28	Kabupaten Pacitan
10	Kabupaten Bojonegoro	29	Kabupaten Madiun
11	Kota Mojokerto	30	Kabupaten Kediri
12	Kabupaten Tuban	10	Kabupaten Bondowoso
13	Kota Probolinggo	32	Kabupaten Trenggalek
14	Kota Blitar	33	Kabupaten Nganjuk
15	Kabupaten Banyuwangi	34	Kabupaten Bangkalan
16	Kota Pasuruan	35	Kabupaten Ngawi
17	Kabupaten Malang	36	Kabupaten Ponorogo
18	Kabupaten Tulungagung	37	Kabupaten Sampang
19	Kabupaten Jombang	38	Kabupaten Pamekasan

Sumber : BPS Statistik Provinsi Jawa Timur data diolah

## **E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data merujuk pada tempat atau cara dimana informasi itu ada atau dikumpulkan untuk digunakan dalam penelitian atau analisis. Data yang dipakai pada observasi ini ialah data sekunder. "Data sekunder yaitu sumber informasi tidak langsung yang diperoleh oleh peneliti, seperti data yang diambil pada situs web, artikel, atau jurnal publikasi, majalah, dan lain sebagainya." (Sugiyono, 2019). Sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui web BPS Provinsi Jawa Timur serta laman DJPK Kemenkeu. Data yang diperoleh berupa laporan APBD Kabupaten/Kota pada tahun 2020-2022.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dipakai pada observasi ini yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka pada laporan realisasi keuangan daerah yang diterbitkan oleh BPS Jawa Timur serta DJPK Kemenkeu.

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang dipakai dalam pengambilan informasi maupun data yang dibutuhkan untuk observasi atau analisis. Pengumpulan data observasi ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

#### *a. Library Research (Studi Kepustakaan)*

Teknik ini merujuk pada proses pengumpulan data yang didasarkan pada sumber informasi yang berasal dari literatur,

dokumen, jurnal ilmiah, buku, dan berbagai sumber lain yang memiliki kaitan dengan fenomena yang dianalisa pada penelitian ini.

b. *File Research* (Studi Lapangan)

Observasi ini memakai metode pengumpulan data dokumentasi. Teknik ini merujuk pada proses pengumpulan informasi dari berbagai dokumen, catatan, atau sumber lain untuk digunakan dalam penelitian atau analisis. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan data terkait Retribusi Daerah serta PDRB dari Kota atau Kabupaten di Jawa Timur tahun 2020-2022. Data-data tersebut peneliti dapatkan melalui akses dari <sup>13</sup> *website* BPS Jawa Timur [www.jatim.bps.go.id](http://www.jatim.bps.go.id) serta <sup>122</sup> *website* DJPK Kemenkeu [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

c. *Online Research* (Riset Internet)

Riset internet merupakan proses pengumpulan informasi atau data melalui internet untuk menambah bahan bacaan, jurnal, maupun data lain yang memiliki kaitan dengan observasi <sup>61</sup> ini.

## F. Teknik Analisis Data

### 1. Jenis Analisis

Analisa yang dipakai pada penelitian ini <sup>5</sup> ialah analisis regresi data panel yaitu analisa data yang <sup>4</sup> mengkombinasikan data *time series* serta data *cross section*

### a. Uji Analisis Regresi Data Panel

Metode analisis regresi data panel difungsikan untuk menganalisa pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, serta Pendapatan Perkapita pada Pendapatan Asli Daerah. Menurut Basuki, (2017) "Data panel ialah kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) serta data silang (*cross section*)." Data *time series* adalah data yang mencakup beberapa variabel yang akan dianalisa dalam suatu komponen penelitian pada rentang waktu tertentu. Sedangkan data *cross-section* ialah data yang diambil pada sejumlah unit yang melihat sesuatu pada titik waktu.

Persamaan model data panel dalam observasi ini dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

- $Y$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2$  = Koefisien regresi variabel
- $X1$  = Pajak Daerah
- $X2$  = Retribusi Daerah
- $X3$  = Demografi
- $X4$  = Pendapatan per kapita
- $i$  = *Cross section* (Kabupaten/Kota)

t = *Time Series* (2020-2022)

E = *error*

Menurut Gujarati, D.N dan Porter, (2013) terdapat tiga model dalam meregresikan data, yaitu :

### 1) *Common Effect Model (CEM)/Pooled Least Square (PLS)*

*Common Effect Model (CEM)* ialah model regresi data panel dengan penggabungan data runtut waktu (*time series*) serta data silang (*cross section*) berdasarkan pendekatan kuadrat terkecil. CEM disebut juga metode *Pooled Least Square (PLS)*. Persamaan CEM dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + e_{it}$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

$\alpha$  = konstanta

$\beta$  = koefisien regresi

X = variabel independent

i = *cross section*

t = *time series*

e = *error*

### 2) *Fixed Effect Model (FEM)*

*Fixed Effect Model* merupakan model data panel yang menunjukkan variasi pengaruh antar individu. Efek ini dapat

dihitung dengan teknik *least square dummy*. FEM dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_2 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \dots + e_{it}$$

Keterangan :

- Y = variabel dependen
- $\alpha$  = konstanta
- X = variabel independent
- i = *cross section*
- t = *time series*
- e = *error*

### 3) *Random Effect Model (REM)*

*Random Effect Model* merupakan data panel yang menganggap apabila setiap subjek penelitian mempunyai intersep yang berbeda, yang dianggap sebagai variabel acak. Model ini mirip dengan *Fixed Effect Model* yang mengikut sertakan dimensi individu dan waktu. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada penanganan error term. *Random Effect Model* memasukkan error term yang diasumsikan terkait dengan dimensi individu dan waktu, memungkinkan penanganan variasi yang lebih kompleks dalam data panel. REM dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_2 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \dots + e_{it}$$

Keterangan :

Y	= variabel dependen
$\alpha$	= konstanta
X	= variabel independent
i	= <i>cross section</i>
t	= <i>time series</i>
e	= <i>error</i>

## b. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

### 1) Uji Chow

Uji chow ialah analisis yang dipakai untuk menetapkan jenis model yang dipakai diantara <sup>12</sup> *common effect model* atau *Fixed effect model*. Hipotesis pada uji chow ialah sebagai berikut (Ghozali & Ratmono, 2017) :

- (a) Apabila nilai probabilitas *cross section Chi square*  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, sehingga menggunakan *Common Effect Model*
- (b) Apabila nilai probabilitas *cross section Chi square*  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, sehingga menggunakan *Fixed Effect Model*

### 2) Uji Hausman

Uji Hausman ialah analisis yang dipakai untuk menentukan antara model *fixed effect model* <sup>110</sup> dengan *random effect model*. <sup>61</sup> ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Rosinta, 2018) :

- (a) Apabila nilai probabilitas *cross section random*  $> 0,05$  maka  $H_0$  <sup>22</sup> diterima, sehingga *Random Effect Model* yang digunakan.

(b) Apabila nilai probabilitas cross section random  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, sehingga *Fixed Effect Model* yang digunakan.

### <sup>4</sup> 3) Uji Lagrange Multiplier (LM) Test

Uji LM dipakai untuk memilih model diantara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. dasar pengambilan keputusan yaitu : (Faisol & Sujianto, 2020)

$H_0$  = Pilih *common effect* atau hipotesis dapat dinyatakan

$H_0 = \text{Prob} > \text{chibar}^2 > \alpha (0,05)$  adalah *common effect*

$H_1$  = Pilih *random effect* atau dapat dinyatakan

$H_1 = \text{Prob} < \text{chibar}^2 < \alpha (0,05)$  adalah *random effect*

### c. <sup>4</sup> Uji Asumsi Klasik

Pada dasarnya, pengujian asumsi klasik tidak dilakukan pada analisis data panel karena dapat memberikan lebih banyak informasi, varians, dan tingkat kebebasan serta mengurangi bias potensial pada temuan penelitian. (Gujarati et al., 2012)

Panel data memungkinkan untuk memeriksa dengan lebih rinci terkait perilaku yang ada dalam model sehingga menghilangkan kebutuhan untuk pengujian asumsi klasik ketika pengujian asumsi klasik dilakukan (Gujarati et al., 2012). Keuntungan regresi data panel menghasilkan kemampuan untuk mendeteksi dan mengukur dampak

lebih efektif. <sup>94</sup> Persamaan yang memenuhi uji asumsi klasik adalah persamaan dengan menggunakan *Generalized Least Square* (GLS).

Berdasarkan pengujian yang dilakukan sebelumnya, <sup>38</sup> model yang terpilih yaitu *Random Effect Model*. Maka, penelitian ini tidak menggunakan uji asumsi klasik.

## 2. Pengujian Hipotesis

Hipotesis ialah asumsi atau dugaan yang diajukan sebelum melakukan suatu penelitian atau percobaan untuk diuji kebenarannya. Pengujian hipotesis dilakukan melalui berbagai metode yaitu :

### a. <sup>5</sup> Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Menurut Sugiyono, (2018) “uji t adalah hasil sementara <sup>1</sup> pada rumusan masalah, yang mempertanyakan keterkaitan antara dua atau lebih variabel.” kriteria yang dipakai dalam menguji hubungan antar variabel dituliskan <sup>84</sup> sebagai berikut :

1.  $H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$  ; hal ini diartikan tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel bebas pada variabel terikat dalam model.
2.  $H_1 : \beta_1, \beta_2 \neq 0$  ; hal ini diartikan <sup>43</sup> variabel bebas memiliki pengaruh signifikan pada variabel terikat.

### b. Uji Simultan ( Uji F)

Menurut Ghozali, (2016) “uji ini dipakai sebagai penentuan jika variabel terikat secara simultan mempunyai pengaruh pada variabel bebas.” Ketentuan dari uji F dapat dituliskan seperti berikut :

1. Apabila nilai signifikan  $F < 0,05$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.  
Yang berarti jika semua variabel independent/bebas mempunyai pengaruh signifikan pada variabel dependen/terikat.
2. Apabila nilai signifikan  $F > 0,05$  berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.  
Yang berarti semua variabel independent/bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan pada variabel dependen/terikat.

**c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Ghozali, (2021) “Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dipakai dalam menilai bagaimana kemampuan model dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Rentang nilai  $R^2$  yaitu antara 0 hingga 1.” Nilai  $R^2$  yang rendah menandakan keterbatasan kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Sebaliknya, nilai yang semakin dekat dengan nilai 1 menunjukkan apabila variabel bebas hampir secara lengkap memberikan keterangan yang digunakan untuk memperkirakan variabel terikat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Subjek Penelitian**

Provinsi Jawa Timur ialah salah satu provinsi terbesar di Indonesia, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Provinsi ini memiliki 29 kabupaten dan 9 kota dengan Ibukota di kota Surabaya. Provinsi ini mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional, dengan kontribusi signifikan dari sektor industri, pertanian, perdagangan, dan jasa.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Jawa Timur menyentuh lebih dari 40 juta jiwa. Kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan beberapa kabupaten seperti Sumenep dan Pacitan memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah.

Kegiatan ekonomi yang ada di Jawa Timur cukup beragam dengan sektor industri, perdagangan, dan pertanian sebagai kontributor utama. Pendapatan per kapita masyarakat di Jawa Timur juga cukup bervariasi pada beberapa kabupaten dan kota. Kota-kota besar di Provinsi Jawa Timur umumnya memiliki pendapatan per kapita yang cenderung tinggi daripada daerah kabupaten/kota yang lebih kecil.

#### **B. Deskripsi Data Variabel**

##### **1. Variabel Bebas**

Variabel bebas ialah variabel yang memengaruhi maupun mengakibatkan perbedaan pada variabel dependen (terikat). Variabel bebas pada observasi ini meliputi Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2),

Demografi (X3), Pendapatan Perkapita (X4). Berikut disajikan data-data dari variabel bebas :

**6**  
a. Pajak Daerah (X1)

Pajak Daerah ialah bagian pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pengembangan pada wilayah tersebut.

Pajak daerah mencakup beberapa objek diantaranya **20** Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Opsen Pajak MBLB, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, **58** Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Objek Pajak tersebut dapat dihitung melalui perhitungan **95** berikut:

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

**Tabel 4.1**  
**Pajak Daerah**

Kabupaten/Kota	Tahun			Rata -Rata
	2020	2021	2022	
Kota Kediri	112.204.944.289	121.848.704.158	121.848.704.158	121.848.704.158
Kota Surabaya	3.277.053.240.709	3.694.769.022.511	3.694.769.022.511	3.694.769.022.511
Kabupaten Gresik	590.087.765.850	698.599.886.427	698.599.886.427	698.599.886.427

Kabupaten Sidoarjo	929.261.529.986	1.057.462.466.720	1.057.462.466.720	1.057.462.466.720
--------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------

Lanjutan Tabel 4.1

Kabupaten Pasuruan	360.889.758.442	402.334.765.817	402.334.765.817	402.334.765.817
Kota Malang	351.759.920.903	443.144.370.326	443.144.370.326	443.144.370.326
Kota Batu	136.766.373.975	147.700.693.192	147.700.693.192	147.700.693.192
Kabupaten Mojokerto	280.725.934.639	333.732.011.416	333.732.011.416	333.732.011.416
Kota Madiun	90.291.466.033	94.824.698.938	94.824.698.938	94.824.698.938
Kabupaten Bojonegoro	116.294.020.878	138.262.627.341	138.262.627.341	138.262.627.341
Kota Mojokerto	49.932.201.610	216.585.213.150	216.585.213.150	216.585.213.150
Kabupaten Tuban	306.909.482.317	304.273.934.570	304.273.934.570	304.273.934.570
Kota Probolinggo	38.425.937.211	47.172.274.682	47.172.274.682	47.172.274.682
Kota Blitar	37.530.670.036	40.310.255.225	40.310.255.225	40.310.255.225
Kabupaten Banyuwangi	191.631.105.772	209.745.315.320	209.745.315.320	209.745.315.320
Kota Pasuruan	34.172.474.456	40.248.259.988	40.248.259.988	40.248.259.988
Kabupaten Malang	280.725.934.639	334.895.481.042	334.895.481.042	334.895.481.042
Kabupaten Tulungagung	93.357.599.038	112.997.578.588	112.997.578.588	112.997.578.588
Kabupaten Jombang	131.165.939.414	150.354.817.311	150.354.817.311	150.354.817.311
Kabupaten Jember	183.641.795.462	229.041.015.575	229.041.015.575	229.041.015.575
Kabupaten Sumenep	42.657.767.499	45.253.228.639	45.253.228.639	45.253.228.639
Kabupaten Blitar	89.506.182.946	106.133.179.011	106.133.179.011	106.133.179.011
Kabupaten Lamongan	134.050.166.691	140.846.333.510	140.846.333.510	140.846.333.510
Kabupaten Probolinggo	63.800.464.846	71.228.239.169	71.228.239.169	71.228.239.169
Kabupaten Lumajang	68.659.995.181	101.469.833.692	101.469.833.692	101.469.833.692
Kabupaten Situbondo	42.657.767.499	48.733.771.297	48.733.771.297	48.733.771.297
Kabupaten Magetan	54.292.389.850	59.971.976.908	59.971.976.908	59.971.976.908
Kabupaten Pacitan	35.062.233.638	37.606.331.670	37.606.331.670	37.606.331.670
Kabupaten Madiun	69.642.788.090	80.592.842.972	80.592.842.972	80.592.842.972
Kabupaten Kediri	215.296.696.264	225.579.218.076	225.579.218.076	225.579.218.076
Kabupaten Bondowoso	30.580.807.591	35.655.627.584	35.655.627.584	35.655.627.584
Kabupaten Trenggalek	34.601.359.086	40.656.782.855	40.656.782.855	40.656.782.855
Kabupaten Nganjuk	110.299.917.867	122.499.345.183	122.499.345.183	122.499.345.183
Kabupaten Bangkalan	46.623.597.590	49.865.999.680	49.865.999.680	49.865.999.680
Kabupaten Ngawi	66.002.901.096	69.763.582.072	69.763.582.072	69.763.582.072
Kabupaten Ponorogo	90.424.462.673	101.323.648.705	101.323.648.705	101.323.648.705
Kabupaten Sampang	27.481.457.077	31.603.552.698	31.603.552.698	31.603.552.698
Kabupaten Pamekasan	37.192.592.664	40.741.094.810	40.741.094.810	40.741.094.810
<b>Tertinggi</b>				<b>3.694.769.022.511</b>
<b>Terendah</b>				<b>31.603.552.698</b>

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) (data diolah)

Tabel tersebut menyajikan nilai rata-rata Pajak Daerah dari 38 Kota serta Kabupaten di Jawa Timur. Dalam 3 periode terakhir dapat diketahui nilai rata-rata penerimaan pajak tertinggi terdapat pada Kota Surabaya dengan nilai rata-rata 3.694.769.022.511. Hal ini dapat dikarenakan tingginya industri, perdagangan, dan berbagai kegiatan masyarakat dibidang jasa yang berdampak pada tingginya pendapatan pajak daerah di Kota Surabaya. Begitu pula, nilai pajak daerah terendah terdapat pada Kabupaten Sampang dengan nilai rata-rata 31.603.552.698. hal ini dapat dikarenakan rendahnya kegiatan masyarakat dibidang jasa ataupun perdagangan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa terdapat adanya kesenjangan kondisi perekonomian yang menyebabkan Pajak Daerah di Jawa Timur tidak stabil.

<sup>19</sup>  
b. Retribusi Daerah (X2)

Retribusi Daerah ialah biaya yang dikenakan pemerintah setempat atas imbalan untuk layanan tertentu maupun perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk digunakan oleh seseorang atau organisasi. Pungutan ini bersifat timbal balik yaitu penerima layanan atau fasilitas wajib membayar retribusi sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh.

Retribusi daerah diklasifikasikan menjadi 3 kelompok diantaranya <sup>54</sup> Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, serta Retribusi Perizinan Tertentu. Perhitungan Retribusi Daerah dapat dilakukan menggunakan rumus :

$$\text{Retribusi Daerah} = \text{Tarif Retribusi} \times \text{DPP}$$

**Tabel 4.2**  
**Retribusi Daerah**

Kabupaten/Kota	Tahun			Rata-Rata
	2020	2021	2022	
Kota Kediri	10.293.135.651	115.831.411.162	25.328.365.948	50.484.304.254
Kota Surabaya	301.268.032.271	235.591.662.263	269.599.560.046	268.819.751.527
Kabupaten Gresik	65.623.474.230	62.608.242.761	90.871.466.103	73.034.394.365
Kabupaten Sidoarjo	58.931.135.490	65.341.926.569	60.672.060.849	61.648.374.303
Kabupaten Pasuruan	34.236.693.406	30.094.738.924	33.794.826.500	32.708.752.943
Kota Malang	38.449.140.906	40.823.425.185	41.460.096.255	40.244.220.782
Kota Batu	4.635.912.900	5.170.531.250	6.946.692.353	5.584.378.834
Kabupaten Mojokerto	35.758.916.644	29.248.498.474	24.458.005.165	29.821.806.761
Kota Madiun	15.619.539.719	17.463.721.195	21.391.190.137	18.158.150.350
Kabupaten Bojonegoro	28.321.158.415	32.742.645.778	33.315.473.535	31.459.759.243
Kota Mojokerto	10.894.179.925	10.699.674.588	12.039.645.906	11.211.166.806
Kabupaten Tuban	31.534.164.145	55.579.430.221	30.610.672.534	39.241.422.300
Kota Probolinggo	12.619.078.406	13.322.674.337	12.995.734.364	12.979.162.369
Kota Blitar	6.681.655.444	6.383.791.892	6.777.531.073	6.614.326.136
Kabupaten Banyuwangi	45.631.411.394	43.211.935.541	42.989.558.016	43.944.301.650
Kota Pasuruan	7.194.776.862	7.591.157.397	8.117.254.501	7.634.396.253
Kabupaten Malang	23.195.929.714	32.025.994.927	34.668.963.079	29.963.629.240
Kabupaten Tulungagung	22.413.998.868	20.602.266.523	18.081.749.300	20.366.004.897

Kabupaten Jombang	23.310.262.04 2	19.412.669.58 7	20.625.241.07 0	21.116.057.566
Kabupaten Jember	32.377.780.51 8	31.782.076.70 7	38.871.833.95 6	34.343.897.060
Kabupaten Sumenep	18.117.339.17 6	10.087.793.49 2	9.528.945.161	12.578.025.943
Kabupaten Blitar	18.899.793.27 9	28.471.414.09 3	18.147.102.67 0	21.839.436.681
Kabupaten Lamongan	15.570.854.05 4	14.295.271.27 4	23.605.842.84 8	17.823.989.392
Kabupaten Probolinggo	13.692.582.87 5	15.617.128.77 7	17.420.770.58 0	15.576.827.411
Kabupaten Lumajang	46.060.581.31 7	32.014.323.15 1	20.154.021.67 8	32.742.975.382
Kabupaten Situbondo	10.094.506.98 3	12.284.042.37 3	13.162.603.36 8	11.847.050.908
Kabupaten Magetan	23.219.722.04 2	20.789.526.83 1	32.138.419.54 5	25.382.556.139
Kabupaten Pacitan	18.994.470.32 1	16.829.943.99 3	26.929.864.10 1	20.918.092.805
Kabupaten Madiun	8.759.612.040	7.990.977.700	8.892.585.049	8.547.724.930
Kabupaten Kediri	25.581.608.36 9	26.810.037.67 0	26.441.173.93 6	26.277.606.658
Kabupaten Bondowoso	18.316.717.23 5	14.367.036.05 2	9.737.318.237	14.140.357.175
Kabupaten Trenggalek	15.977.293.38 4	12.613.997.04 6	16.992.458.11 6	15.194.582.849
Kabupaten Nganjuk	26.520.448.22 8	25.138.334.33 0	26.649.804.65 6	26.102.862.405
Kabupaten Bangkalan	10.226.165.00 0	13.359.256.49 6	12.874.035.43 7	12.153.152.311
Kabupaten Ngawi	8.498.930.664	8.767.064.094	10.246.461.23 1	9.170.818.663
Kabupaten Ponorogo	13.718.556.18 8	11.395.502.88 1	14.982.802.20 1	13.365.620.423
Kabupaten Sampang	15.911.335.32 6	20.899.641.93 5	30.032.868.55 1	22.281.281.937
Kabupaten Pamekasan	16.517.650.38 1	10.053.688.75 4	12.295.037.08 4	12.955.458.740
Tertinggi				268.819.751.527
Terdah				5.584.378.834

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) (data diolah)

Tabel tersebut menyajikan rata-rata penerimaan Retribusi daerah dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun nilai rata-rata Retribusi Daerah tertinggi terdapat pada Kota Surabaya dengan nilai rata-rata 268.819.751.527. Sedangkan daerah dengan rata-rata penerimaan Retribusi Daerah terendah terdapat pada Kota Batu dengan nilai rata-rata 5.584.378.834.

c. Demografi (X3)

Demografi merupakan studi tentang populasi manusia, yang mencakup berbagai aspek seperti jumlah, struktur, distribusi, serta karakteristik penduduk suatu wilayah atau negara. Aspek Demografi yang dibahas pada observasi ini ialah aspek jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat dihasilkan menggunakan rumus berikut :

$$\text{Jumlah Penduduk} = \text{Penduduk Laki-Laki} + \text{Penduduk Perempuan}$$

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk**

Kabupaten/Kota	Tahun			Jumlah
	2020	2021	2022	
Kota Kediri	286.796	287.962	289.418	864.176
Kota Surabaya	2.874.314	2.880.284	2.887.223	8.641.821
Kabupaten Gresik	1.311.215	1.320.570	1.332.664	3.964.449
Kabupaten Sidoarjo	2.082.801	2.091.930	2.103.401	6.278.132
Kabupaten Pasuruan	1.605.969	1.611.805	1.619.035	4.836.809
Kota Malang	843.810	844.933	846.126	2.534.869
Kota Batu	213.046	214.653	216.735	644.434
Kabupaten Mojokerto	1.119.209	1.125.522	1.133.584	3.378.315
Kota Madiun	195.175	196.917	199.192	591.284
Kabupaten Bojonegoro	1.301.635	1.307.602	1.315.125	3.924.362
Kota Mojokerto	132.434	133.272	134.350	400.056
Kabupaten Tuban	1.198.012	1.203.127	1.209.543	3.610.682

Lanjutan Tabel 4.3

Kota Probolinggo	239.649	241.202	243.200	724.051
Kota Blitar	149.149	150.371	151.960	451.480
Kabupaten Banyuwangi	1.708.114	1.718.462	1.731.731	5.158.307
Kota Pasuruan	208.006	209.528	211.497	629.031
Kabupaten Malang	2.654.448	2.668.296	2.685.900	8.008.644
Kabupaten Tulungagung	1.089.775	1.096.588	1.105.337	3.291.700
Kabupaten Jombang	1.318.062	1.325.914	1.335.972	3.979.948
Kabupaten Jember	2.536.729	2.550.360	2.567.718	7.654.807
Kabupaten Sumenep	1.124.436	1.129.822	1.136.632	3.390.890
Kabupaten Blitar	1.223.745	1.231.013	1.240.322	3.695.080
Kabupaten Lamongan	1.344.165	1.356.027	1.371.509	4.071.701
Kabupaten Probolinggo	1.152.537	1.155.894	1.159.965	3.468.396
Kabupaten Lumajang	1.119.251	1.127.094	1.137.227	3.383.572
Kabupaten Situbondo	685.967	688.337	691.260	2.065.564
Kabupaten Magetan	670.812	674.133	678.343	2.023.288
Kabupaten Pacitan	586.110	589.108	592.916	1.768.134
Kabupaten Madiun	744.350	750.143	757.665	2.252.158
Kabupaten Kediri	1.635.294	1.644.400	1.656.020	4.935.714
Kabupaten Bondowoso	776.151	778.525	781.417	2.336.093
Kabupaten Trenggalek	731.125	734.888	739.669	2.205.682
Kabupaten Nganjuk	1.103.902	1.109.683	1.117.033	3.330.618
Kabupaten Bangkalan	1.060.377	1.071.712	1.086.620	3.218.709
Kabupaten Ngawi	870.057	873.346	877.432	2.620.835
Kabupaten Ponorogo	949.318	955.839	964.253	2.869.410
Kabupaten Sampang	969.694	976.020	984.162	2.929.876
Kabupaten Pamekasan	850.057	853.507	857.818	2.561.382
Tertinggi				8.641.821
Terendah				400.056

Sumber : [www.bpsjatim.go.id](http://www.bpsjatim.go.id) (data diolah)

Tabel tersebut menyajikan Jumlah Penduduk Kota serta Kabupaten di Jawa Timur dalam 3 tahun. berdasarkan data tersebut dapat diketahui Jumlah Penduduk tertinggi selama 3 tahun terdapat pada Kota Surabaya. Sebaliknya, Jumlah Penduduk terendah dalam 3 tahun terdapat pada Kota Mojokerto.

## d. Pendapatan Perkapita (X4)

Pendapatan Perkapita merupakan ukuran yang digunakan dalam mengevaluasi tingkat pendapatan rata-rata yang diperoleh oleh individu atau kelompok dalam suatu wilayah tertentu. Pendapatan Perkapita dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Pendapatan Perkapita dapat dihasilkan melalui perhitungan berikut :

$$\text{Pendapatan Perkapita} = \frac{\text{PDRB atas dasar harga konstan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

**Tabel 4.4**  
**Pendapatan Perkapita**

Kabupaten/Kota	Tahun			Rata-Rata
	2020	2021	2022	
Kota Kediri	2.941.987	3.003.369	3.106.310	3.017.222
Kota Surabaya	1.360.103	1.415.575	1.504.104	1.426.594
Kabupaten Gresik	744.474	767.235	816.387	776.032
Kabupaten Sidoarjo	649.631	674.021	720.804	681.485
Kabupaten Pasuruan	642.309	667.763	700.121	670.064
Kota Malang	606.232	630.934	669.860	635.675
Kota Batu	517.531	534.416	562.018	537.988
Kabupaten Mojokerto	516.601	534.851	561.933	537.795
Kota Madiun	515.225	535.134	558.235	536.198
Kabupaten Bojonegoro	535.506	503.513	469.787	502.935
Kota Mojokerto	362.558	373.409	390.994	375.654
Kabupaten Tuban	356.446	365.587	395.937	372.657
Kota Probolinggo	335.295	346.643	364.836	348.925
Kota Blitar	316.636	327.497	340.984	328.372
Kabupaten Banyuwangi	312.011	322.804	334.536	323.117
Kota Pasuruan	274.348	282.282	297.044	284.558
Kabupaten Malang	250.694	257.164	268.575	258.811
Kabupaten Tulungagung	242.764	249.778	260.725	251.089
Kabupaten Jombang	209.835	215.350	225.201	216.795
Kabupaten Jember	207.301	214.435	222.638	214.791
Kabupaten Sumenep	209.407	213.851	219.179	214.146

Kabupaten Blitar	203.846	208.771	217.986	210.201
Kabupaten Lamongan	200.665	205.722	214.708	207.032
Kabupaten Probolinggo	198.676	204.728	213.232	205.545
Kabupaten Lumajang	195.969	200.723	207.756	201.483
Kabupaten Situbondo	193.636	199.260	207.129	200.008
Kabupaten Magetan	194.107	199.026	205.489	199.541
Kabupaten Pacitan	184.912	188.546	197.708	190.389
Kabupaten Madiun	176.612	181.068	187.017	181.566
Kabupaten Kediri	174.226	178.556	185.992	179.591
Kabupaten Bondowoso	173.314	178.821	184.411	178.849
Kabupaten Trenggalek	171.002	176.340	183.128	176.823
Kabupaten Nganjuk	162.971	167.982	174.956	168.636
Kabupaten Bangkalan	165.173	160.050	156.079	160.434
Kabupaten Ngawi	154.929	158.282	162.570	158.594
Kabupaten Ponorogo	149.250	152.955	156.533	152.913
Kabupaten Sampang	143.898	143.282	145.386	144.189
Kabupaten Pamekasan	130.787	134.694	140.258	135.246
Tertinggi				3.017.222
Terendah				135.246

Sumber : [www.bpsjatim.go.id](http://www.bpsjatim.go.id) (data diolah)

Tabel diatas menyajikan data Pendapatan Perkapita dalam 3 tahun. berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui daerah yang mempunyai rata-rata Pendapatan Perkapita paling tinggi ialah Kota Kediri dengan rata rata 3.017.222. Sebaliknya, daerah dengan rata-rata Pendapatan Perkapita yang rendah adalah Kabupaten Pamekasan dengan nilai rata-rata 135.246.

30

## 2. Variabel Terikat

Variabel terikat ialah variabel yang terpengaruh dengan variabel lain.

Observasi ini menggunakan variabel terikat <sup>43</sup> Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang didapatkan melalui berbagai sumber penerimaan di wilayahnya serta diatur sesuai undang-undang. Peningkatan kontribusi PAD dalam membantu

<sup>126</sup> pembangunan dan pelayanan publik menunjukkan apabila kinerja keuangan pemerintah daerah telah membaik. PAD dapat dihitung melalui penjumlahan rumus berikut :

<sup>5</sup> PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.

**Tabel 4.5**  
**Pendapatan Asli Daerah**

Kabupaten/Kota	Tahun			Rata-Rata
	2020	2021	2022	
Kota Kediri	262.886.289.228	439.896.279.120	319.295.604.320	340.692.724.223
Kota Surabaya	4.289.960.292.366	4.727.280.629.670	5.314.695.257.794	4.777.312.059.943
Kabupaten Gresik	924.657.913.563	1.031.387.734.238	1.191.799.202.154	1.049.281.616.652
Kabupaten Sidoarjo	1.798.515.529.275	1.921.244.253.336	1.823.873.029.127	1.847.877.603.913
Kabupaten Pasuruan	700.151.909.602	701.199.341.703	736.238.743.114	712.529.998.140
Kota Malang	491.189.243.955	603.794.666.883	718.337.293.395	604.440.401.411
Kota Batu	136.766.373.975	147.007.052.561	203.318.424.547	162.363.950.361
Kabupaten Mojokerto	537.297.509.365	625.418.916.520	676.708.151.151	613.141.525.679
Kota Madiun	248.939.881.630	265.920.295.217	264.296.054.518	259.718.743.788
Kabupaten Bojonegoro	720.914.033.084	955.640.728.380	804.014.681.242	826.856.480.902
Kota Mojokerto	231.875.337.606	256.381.213.286	224.372.824.031	237.543.124.974
Kabupaten Tuban	566.077.757.668	614.733.285.905	574.696.171.350	585.169.071.641
Kota Probolinggo	254.884.191.562	212.846.009.771	191.597.662.538	219.775.954.624
Kota Blitar	174.590.638.444	297.618.527.754	156.268.172.004	209.492.446.067
Kabupaten Banyuwangi	482.740.174.377	520.021.954.381	516.757.143.544	506.506.424.101
Kota Pasuruan	145.036.603.028	131.837.446.162	154.689.456.472	143.854.501.887
Kabupaten Malang	583.846.309.201	669.361.940.837	763.117.874.062	672.108.708.033
Kabupaten Tulungagung	510.549.330.895	953.892.026.424	577.544.166.624	680.661.841.314
Kabupaten Jombang	468.627.918.704	665.844.012.375	522.526.189.812	552.332.706.964
Kabupaten Jember	593.175.154.486	635.305.965.623	640.463.484.847	622.981.534.985
Kabupaten Sumenep	260.329.014.334	252.690.773.879	247.070.353.453	253.363.380.555
Kabupaten Blitar	302.540.062.676	407.530.973.690	422.738.491.400	377.603.175.922
Kabupaten Lamongan	481.752.331.399	604.587.635.068	507.577.455.390	531.305.807.286

Kabupaten Probolinggo	254.884.191.562	300.398.775.731	261.450.104.582	272.244.357.292
Kabupaten Lumajang	300.263.112.643	325.045.892.762	361.388.610.784	328.899.205.396

Lanjutan Tabel 4.4

Kabupaten Situbondo	218.845.065.633	228.766.562.733	253.352.994.072	233.654.874.146
Kabupaten Magetan	203.465.853.559	243.732.143.560	238.172.331.191	228.456.776.103
Kabupaten Pacitan	168.459.638.378	211.689.109.365	168.253.890.341	182.800.879.361
Kabupaten Madiun	258.211.505.535	333.154.568.460	377.425.844.392	322.930.639.462
Kabupaten Kediri	494.413.404.880	513.773.026.141	649.630.917.160	552.605.782.727
Kabupaten Bondowoso	222.657.296.674	223.136.567.608	182.034.311.611	209.276.058.631
Kabupaten Trenggalek	257.977.450.484	233.490.679.200	422.488.717.358	304.652.282.347
Kabupaten Nganjuk	402.347.144.361	478.462.299.147	445.589.935.501	442.133.126.336
Kabupaten Bangkalan	233.177.792.497	271.656.642.591	169.746.993.386	224.860.476.158
Kabupaten Ngawi	269.979.788.589	283.608.932.667	309.326.829.397	287.638.516.884
Kabupaten Ponorogo	303.331.015.448	376.702.757.475	323.658.474.680	334.564.082.534
Kabupaten Sampang	175.518.944.949	135.499.437.439	184.053.093.326	165.023.825.238
Kabupaten Pamekasan	232.262.477.005	205.969.039.947	231.934.835.123	223.388.784.025
Tertinggi				4.777.312.059.943
Terendah <sup>16</sup>				143.854.501.887

Sumber : [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) (data diolah)

Tabel tersebut menyajikan penerimaan <sup>2</sup> Pendapatan Asli Daerah pada 38 Kota serta Kabupaten di Jawa Timur selama 3 tahun. Berdasarkan <sup>6</sup> tabel tersebut dapat dilihat daerah dengan rata-rata Pendapatan Asli Daerah tertinggi terdapat pada Kota Surabaya dengan nilai rata-rata 4.777.312.059.943. Sebaliknya, daerah dengan rata-rata PAD paling rendah terdapat pada Kota Pasuruan yang memiliki rata-rata 143.854.501.887.

### C. Analisis Data

#### 1. <sup>1</sup> Model Regresi Data Panel

Pengujian regresi data panel dapat dilakukan berdasarkan 3 model diantaranya *common effect model*, *fixed effect model*, *random effect model*.

Berikut disajikan hasil pengujian dari 3 model berikut :

46

#### a. *Common effect model/Pooled Least Square*

Model ini ialah metode yang paling sederhana. Model ini mengkombinasikan data cross section dan data time series.

Persamaan *common effect model* dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \dots + e_{it}$$

33

Berikut hasil analisis regresi menggunakan *Common Effect Model* :

```
. reg PendapatanAsliDaerahY PajakDaerahX1 RetribusiDaerahX2sqrtsqrt JumlahPendudukX3 PendapatanPerkapitaX2
```

Source	SS	df	MS	Number of obs =	114
Model	6.5049e+25	4	1.6262e+25	F(4, 109)	= 928.52
Residual	1.9090e+24	109	1.7514e+22	Prob > F	= 0.0000
				R-squared	= 0.9715
				Adj R-squared	= 0.9704
Total	6.6958e+25	113	5.9255e+23	Root MSE	= 1.3e+11

PendapatanAsliDaerahY	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
PajakDaerahX1	1.114515	.0338078	32.97	0.000	1.047509 1.181521
RetribusiDaerahX2sqrtsqrt	4.81e+08	3.03e+08	1.59	0.115	-1.19e+08 1.08e+09
JumlahPendudukX3	122446.4	28234.67	4.34	0.000	66486.18 178406.6
PendapatanPerkapitaX2	13088.96	31195.58	0.42	0.676	-48739.66 74917.59
_cons	-6.81e+10	9.50e+10	-0.72	0.475	-2.56e+11 1.20e+11

Sumber : Hasil Pengolahan Data STATA, Output STATA-17

4

#### b. Model Efek Tetap (*fixed effect model*)



```
. xtreg PendapatanAsliDaerahY PajakDaerahX1 RetribusiDaerahX2sqrtsqrt JumlahPendudukX3 PendapatanPerkapitaX2, re
```

Random-effects GLS regression                      Number of obs    =    114  
Group variable: id                                    Number of groups =    38

R-squared:    Obs per group:                                     
  Within = 0.4817                                    min =                                    3  
  Between = 0.9788                                  avg =                                    3.0  
  Overall = 0.9711                                  max =                                    3

corr(u\_i, X) = 0 (assumed)                        Wald chi2(4)       =    1516.86  
   Prob > chi2       =    0.0000

PendapatanAsliDaerahY	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
PajakDaerahX1	1.063325	.0445779	23.85	0.000	.9759543	1.150697
RetribusiDaerahX2sqrtsqrt	5.83e+08	2.86e+08	2.04	0.041	2.34e+07	1.14e+09
JumlahPendudukX3	139986.5	40062.57	3.49	0.000	61465.33	218507.7
PendapatanPerkapitaX2	26890.53	46548.83	0.58	0.563	-64343.51	118124.6
_cons	-1.19e+11	9.56e+10	-1.24	0.215	-3.06e+11	6.89e+10
sigma_u	1.079e+11					
sigma_e	7.987e+10					
rho	.64598464	(fraction of variance due to u_i)				

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

## 2. Uji Pemilihan Model

Pengujian serta penentuan <sup>4</sup> model regresi data panel dipakai sebagai acuan dalam menentukan model yang paling sesuai. Terdapat tiga pengujian sebagai dasar penentuan model estimasi <sup>5</sup> data panel yaitu *Chow-test*, *Hausman Test*, dan *Lagrange Multiple Test*. Berikut merupakan penjelasan serta hasil dari ketiga pilihan model tersebut :

### a. Uji *Chow-Test* <sup>33</sup>

Uji *Chow Test* dipakai sebagai penentuan model yang digunakan diantara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Berikut merupakan hasil pengujian *Chow-test*

```
F test that all u_i=0: F(37, 72) = 6.14          Prob > F = 0.0000
```

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Berdasarkan analisis tersebut, diketahui jika hasil tersebut menunjukkan  $Prob > chi2$   $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_0 = CEM$  tidak diterima dan  $H_1 = FEM$  diterima, artinya model terpilih adalah menggunakan *Fixed Effect Model*.

#### 127 b. Hausman Test

*Hausman Test* adalah analisis yang dipakai dalam penentuan model antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Berikut disajikan hasil dari analisis *Hausman Test*.

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) Std. err.
	(b) FEM	(B) REM		
PajakDaera~1	.6772222	1.063325	-.3861032	.1201377
Retrib~tsqrt	3.95e+08	5.83e+08	-1.88e+08	1.52e+08
JumlahPend~3	672479.3	139986.5	532492.8	1351208
Pendapatan~2	590006.6	26890.53	563116	514226.3

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from xtreg.  
B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from xtreg.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

$$chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B)$$

$$= 2.66$$

Prob > chi2 = 0.4463

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui jika hasil tersebut menunjukkan  $Prob > chi2$   $0,4463 > 0,05$  artinya  $H_0$  : REM diterima

dan H1 : FEM tidak diterima. Maka, model terpilih yaitu <sup>5</sup> *Random Effect Model*.

### c. Lagrange Multiple Test

*Lagrange Multiple Test* ialah analisis sebagai penentuan model data panel yang dipakai antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model*. Berikut ialah hasil dari pengujian *Lagrange Multiple Test*.

```
. xttest0
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

PendapatanAsliDaerahY[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]

Estimated results:
-----+-----+-----
                Var      SD = sqrt(Var)
-----+-----+-----
Pendapa~Y      5.93e+23    7.70e+11
e              6.38e+21    7.99e+10
u              1.16e+22    1.08e+11

Test: Var(u) = 0
             chibar2(01) =   37.49
             Prob > chibar2 =  0.0000
```

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Berdasarkan hasil observasi tersebut, diketahui bahwa hasil tersebut menunjukkan  $Prob > chibar2$  0,000, < 0,05 sehingga  $H_0 = CEM$  tidak diterima  $H_1 = REM$  diterima. Sehingga model terpilih merupakan *Random Effect Model*.

### 3. Hasil Uji Model

Berdasarkan uji *chowtest* yang dilakukan, hasil menunjukkan nilai  $Prob > chi$  0,000 < 0,05 maka model yang diambil menggunakan *fixed effect model*. Kemudian, pengujian dilanjutkan pada *Hausman Test* yang menunjukkan hasil  $Prob > chi$  sebesar 0,591 > 0,05 sehingga model terpilih mengarah pada *random effect model*. Pengujian selanjutnya yaitu

menggunakan *Lagrange Multiple Test* dengan hasil  $Prob > \chi^2 = 0,000 <$

0,05 artinya model yang terpilih mengarah pada *random effect model*.

Berdasarkan *Hausman test* dan *Lagrange Multiple test* hasil keduanya mengarah pada model *random effect modal*. Sehingga dapat diambil

kesimpulan model yang digunakan dalam pengujian hipotesis

menggunakan *Random effect model*.

#### 4. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka model yang dipilih yaitu analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model*.

Berikut ialah hasil pengujian hipotesis berdasarkan pendekatan *Random Effect Model* :

```
. xtreg PendapatanAsliDaerahY PajakDaerahX1 RetribusiDaerahX2sqrtsqrt JumlahPendudukX3 PendapatanPerkapitaX2, re
```

PendapatanAsliDaerahY	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
PajakDaerahX1	1.063325	.0445779	23.85	0.000	-.9759543	1.150697
RetribusiDaerahX2sqrtsqrt	5.83e+08	2.86e+08	2.04	0.041	2.34e+07	1.14e+09
JumlahPendudukX3	139986.5	40062.57	3.49	0.000	61465.33	218507.7
PendapatanPerkapitaX2	26890.53	46548.83	0.58	0.563	-64343.51	118124.6
_cons	-1.19e+11	9.56e+10	-1.24	0.215	-3.06e+11	6.89e+10
sigma_u	1.079e+11					
sigma_e	7.987e+10					
rho	.64598464	(fraction of variance due to u_1)				

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17



b. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dipakai sebagai penentuan apabila variabel terikat secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel bebas.

134

```
. xtreg PendapatanAsliDaerahY PajakDaerahX1 RetribusiDaerahX2sqrtsqrt JumlahPendudukX3 PendapatanPerkapitaX2, re
Random-effects GLS regression              Number of obs   =    114
Group variable: id                         Number of groups =    38

R-squared:                                 Obs per group:
  Within = 0.4817                           min       =     3
  Between = 0.9788                          avg       =    3.0
  Overall = 0.9711                          max       =     3

Wald chi2(4) = 1516.86
corr(u_i, X) = 0 (assumed)
```

PendapatanAsliDaerahY	Coefficient	Std. err.	z	P	[95% interval]
PajakDaerahX1	1.063325	.0445779	23.85	0.000	.9759543 1.150697
RetribusiDaerahX2sqrtsqrt	5.83e+08	2.86e+08	2.04	0.041	2.34e+07 1.14e+09
JumlahPendudukX3	139986.5	40062.57	3.49	0.000	61465.33 218507.7
PendapatanPerkapitaX2	26890.53	46548.83	0.58	0.563	-64343.51 118124.6
._cons	-1.19e+11	9.56e+10	-1.24	0.215	-3.06e+11 6.89e+10
sigma_u	1.079e+11				
sigma_e	7.987e+10				
rho	.64598464	(fraction of variance due to u_i)			

15

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Berdasarkan data tersebut, pengujian simultan dapat diketahui melalui nilai  $Prob > chi2$  sebesar 0,000. Artinya, dapat diambil kesimpulan jika variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan Perkapita memiliki pengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dipakai dalam menentukan bagaimana kemampuan model dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat.

```

. xtreg PendapatanAsliDaerahY PajakDaerahX1 RetribusiDaerahX2sqrtsqrt JumlahPendudukX3 PendapatanPerkapitaX2, re
Random-effects GLS regression              Number of obs   =    114
Group variable: id                        Number of groups =    38
R-squared:                                Obs per group:
  Within = 0.4817                          min           =     3
  Between = 0.9711                         avg           =    3.0
  Overall = 0.9711                         max           =     3
corr(u_i, X) = 0 (assumed)                 Wald chi2(4)    =   1516.86
                                           Prob > chi2    =    0.0000

```

	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]
PajakDaerahX1	1.063325	.0445779	23.85	0.000	-.9759543 1.150697
RetribusiDaerahX2sqrtsqrt	5.83e+08	2.86e+08	2.04	0.041	2.34e+07 1.14e+09
JumlahPendudukX3	139986.5	40062.57	3.49	0.000	61465.33 218507.7
PendapatanPerkapitaX2	26890.53	46548.83	0.58	0.563	-64343.51 118124.6
_cons	-1.19e+11	9.56e+10	-1.24	0.215	-3.06e+11 6.89e+10
sigma_u	1.079e+11				
sigma_e	7.987e+10				
rho	.64598464				(fraction of variance due to u_i)

Sumber : Hasil Pengolahan Data, Output STATA-17

Dikarenakan model yang dipakai merupakan *Random effect model*, maka nilai *R-Squared* dapat diketahui dari nilai *R-Squared Overall* 0,9711 sehingga dapat disimpulkan jika pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 97,11%.

#### D. Pembahasan

Berdasarkan pengujian sebelumnya, diketahui bahwa model regresi yang terpilih merupakan analisis regresi data panel dengan *Random Effect Model*. Sehingga dapat diperoleh hasil berikut :

##### 1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan *Random effect model* Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pernyataan ini ditunjukkan melalui nilai  $P>|z|$   $0,000 < \alpha$   $0,05$ . Hal tersebut berarti jika variabel Pajak Daerah adalah penjelas yang

signifikan pada variabel PAD, sehingga setiap terdapat pertumbuhan Pajak Daerah, berpotensi memiliki dampak pada peningkatan PAD pula. Sebaliknya, apabila Pajak Daerah tidak mengalami pertumbuhan, PAD berpotensi menurun.

Hasil tersebut selaras dengan teori pertumbuhan ekonomi yang mengkaitkan <sup>31</sup> hubungan antara Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah. Apabila pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dengan tepat dan optimal, akan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang meningkat seperti aktivitas produksi dan konsumsi meningkat akan berdampak pada pertumbuhan Pajak Daerah sehingga akan meningkatkan PAD.

<sup>14</sup> Hal tersebut sesuai dengan penelitian V. M. Sari et al., (2022) yang <sup>24</sup> menyebutkan jika variabel Pajak Daerah mempunyai pengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah. Penelitian lain juga disampaikan oleh Sulastri et al., (2020) yang menyebutkan jika secara parsial variabel <sup>11</sup> Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian regresi <sup>5</sup> dengan *Random effect model* menunjukkan jika secara parsial variabel <sup>2</sup> Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pernyataan itu dibuktikan dari nilai  $P > |z| 0,041 < \alpha 0,05$ . Sehingga <sup>63</sup> hal itu menunjukkan jika variabel Retribusi Daerah secara signifikan dapat menjelaskan variabel Pendapatan Asli

Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah yang kian bertambah, akan berakibat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pula.

Pernyataan tersebut menguatkan teori pertumbuhan ekonomi yang memberikan gambaran jika ketika kegiatan ekonomi masyarakat meningkat seperti konsumsi dan investasi hal itu akan mengakibatkan meningkatnya Retribusi Daerah yang berpotensi mengarah terhadap peningkatan PAD.

Hal tersebut juga selaras dengan penelitian oleh Damanik et al., (2022) yang menyebutkan jika variabel Retribusi Daerah memiliki dampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah. Penelitian lain oleh V. M. Sari et al., (2022) juga menyapaikan bahwa variabel Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### 3. Pengaruh Demografi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian regresi dengan *Random effect model* tersebut memperlihatkan jika variabel Demografi yang ditunjukkan oleh aspek jumlah penduduk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. pernyataan tersebut dinyatakan oleh nilai  $P > |z|$  0,000  $< \alpha$  0,05. Hal tersebut berarti jika variabel Demografi mampu menjelaskan secara signifikan terhadap PAD. artinya, besarnya Jumlah Penduduk akan berpengaruh pada PAD. Jumlah Penduduk yang terus meningkat berpotensi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah begitupun sebaliknya.

Hal tersebut menguatkan teori pertumbuhan ekonomi yang menyebutkan bahwa apabila kegiatan ekonomi masyarakat tinggi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk akan memengaruhi PAD.

Hasil tersebut sesuai pula dengan penelitian Elidawaty Purba & Manurung, (2023) yang menyampaikan jika Jumlah Penduduk memiliki pengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah.

4. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel dengan *Random effect model* dapat diketahui jika secara parsial variabel Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah. hal tersebut dibuktikan oleh nilai  $P > |z| 0,563 > \alpha 0,05$ .

Hasil tersebut mengandung arti jika ketika terdapat pertumbuhan Pendapatan Perkapita belum tentu mempunyai pengaruh positif pada peningkatan PAD. pernyataan tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Igir et al., (2018) yang menyebutkan jika Pendapatan Perkapita tidak mempunyai pengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah.

5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel dengan *Random effect model* dapat diketahui jika variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Demografi, dan Pendapatan per kapita secara simultan berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah. hal ini dibuktikan melalui  $\text{prob} > \chi^2_{0,000} < \alpha_{0,05}$ . Sehingga, berdasarkan hal tersebut secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan Perkapita mempunyai pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi dan Pendapatan per kapita terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur selama tahun 2020-2022. Berikut kesimpulan dari observasi yang dilakukan :

1. Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Pernyataan tersebut ditunjukkan melalui hasil pengujian yang dilakukan Pajak Daerah (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan  $P > |z| 0,000 < 0,05$ . Sehingga ketika Pajak Daerah meningkat berarti Pendapatan Asli Daerah akan meningkat juga. Namun, ketika Pajak Daerah menurun, maka PAD juga akan menurun.
2. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Hasil dari analisis regresi data panel menunjukkan nilai  $P > |z| 0,001 < 0,05$ . Sehingga dapat diketahui ketika Retribusi Daerah mengalami kenaikan, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan juga sebaliknya.
3. Demografi memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Aspek Demografi yang dipakai dalam analisis yaitu aspek jumlah penduduk berdasarkan hasil analisis dapat

diketahui nilai  $P > |z| 0,000 < 0,05$ . Sehingga apabila jumlah penduduk mengalami kenaikan, akan berpengaruh pada peningkatan PAD dan sebaliknya, apabila jumlah penduduk mengalami penurunan, akan berpengaruh pada penurunan Pendapatan Asli Daerah.

4. Pendapatan Perkapita tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Pernyataan tersebut diketahui dari  $P > |z| 0,121 > 0,05$ . Sehingga dapat diketahui jika Pendapatan Perkapita yang tinggi pada suatu daerah belum tentu berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
5. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, dan Pendapatan per kapita secara simultan berpengaruh signifikan pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Hasil dari pengujian memperlihatkan nilai  $Prob > \chi^2$  sebesar 0,000 yang berarti  $< 0,05$

## B. Saran

### 1. Bagi Pemerintah

Pemerintah Daerah Jawa Timur sebaiknya lebih berfokus pada peningkatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan per kapita dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, pemerintah Jawa Timur harus melakukan upaya sosialisasi untuk menambah pemahaman masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun, perlu diketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk juga akan memberikan dampak negatif terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sehingga pemerintah harus memperhatikan agar kenaikan jumlah penduduk dapat meningkat sesuai yang diharapkan.

## 2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Jawa Timur, observasi ini bisa dipakai untuk media pengetahuan sehingga dapat memahami tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Masyarakat juga bisa turut serta dalam melakukan pengawasan pada Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, masyarakat dapat bekerja sama dengan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan PAD.

## 3. Bagi Peneliti Lain

Pada penelitian ini masih terdapat banyak ketidaksempurnaan serta celah. Observasi ini hanya membahas 4 variabel yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi, Pendapatan Perkapita. Di samping itu, waktu observasi yang digunakan hanya selama 3 tahun. Oleh karena itu, diharapkan observasi ini mampu dipakai sebagai acuan untuk observasi mendatang dengan memperhatikan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini. Diharapkan peneliti selanjutnya mampu menambah variabel dependen yang memiliki pengaruh terhadap variabel independen seperti variabel Belanja Daerah atau Inflasi, serta memperluas jangkauan waktu penelitian agar dapat memberikan hasil yang berbeda dan dapat memahami variabel lainnya yang memiliki pengaruh pada Pendapatan Asli Daerah.

# Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Demografi dan Pendapatan Perkapita terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur tahun 2020-2022

## ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://proceeding.unpkediri.ac.id">proceeding.unpkediri.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="https://eprints.polsri.ac.id">eprints.polsri.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="https://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://jurnal.umus.ac.id">jurnal.umus.ac.id</a> Internet Source	1%

docplayer.info

9	Internet Source	1 %
10	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id">etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://repository-feb.unpak.ac.id">repository-feb.unpak.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://repository.stei.ac.id">repository.stei.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://sc.syekhnurjati.ac.id">sc.syekhnurjati.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://eprints.unpak.ac.id">eprints.unpak.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id">ecampus.iainbatusangkar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://m.beritajakarta.id">m.beritajakarta.id</a> Internet Source	<1 %

21	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://lib.unnes.ac.id">lib.unnes.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://simki.unpkediri.ac.id">simki.unpkediri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a> Internet Source	<1 %

33	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
34	Clifford M.C Sumarjo, Maryam Mangantar. "PENGARUH RISIKO GEOPOLITIK, PROFTABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUBSEKTOR MIGAS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA", Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 2022 Publication	<1 %
35	<a href="https://repository.fe.unj.ac.id">repository.fe.unj.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="https://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="https://jdih.sumbabaratkab.go.id">jdih.sumbabaratkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="https://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
39	<a href="https://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="https://jurnal.umrah.ac.id">jurnal.umrah.ac.id</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="https://kalsel.bpk.go.id">kalsel.bpk.go.id</a> Internet Source	<1 %

42	<a href="http://repository.utu.ac.id">repository.utu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://repository.its.ac.id">repository.its.ac.id</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://conference.trunojoyo.ac.id">conference.trunojoyo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://dlh.maltengkab.go.id">dlh.maltengkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://ejournal.unibba.ac.id">ejournal.unibba.ac.id</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://repository.unpkediri.ac.id">repository.unpkediri.ac.id</a> Internet Source	<1 %

54	<a href="http://repository.upbatam.ac.id">repository.upbatam.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://ejournal.undiksha.ac.id">ejournal.undiksha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://jdih.cirebonkab.go.id">jdih.cirebonkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://jdih.batam.go.id">jdih.batam.go.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id">jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://jurnal.pancabudi.ac.id">jurnal.pancabudi.ac.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	Afridha Sesrita, Emnis Anwar, Ayu Fadillah. "PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN SEBAGAI HILIRISASI PENELITIAN BERBASIS	<1 %

# TAUHID", QARDHUL HASAN: MEDIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, 2018

Publication

---

65	<a href="http://ejournal.unitomo.ac.id">ejournal.unitomo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://idoc.pub">idoc.pub</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://petabapadah.paserkab.go.id">petabapadah.paserkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
68	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	<1 %
69	<a href="http://pdffox.com">pdffox.com</a> Internet Source	<1 %
70	<a href="http://www.stiekhad.ac.id">www.stiekhad.ac.id</a> Internet Source	<1 %
71	<a href="http://jurnal.unimed.ac.id">jurnal.unimed.ac.id</a> Internet Source	<1 %
72	<a href="http://repository.unusia.ac.id">repository.unusia.ac.id</a> Internet Source	<1 %
73	Margaretha Lionardi, Sugi Suhartono. "Pendeteksian Kemungkinan Terjadinya Fraudulent Financial Statement menggunakan Fraud Hexagon", Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2022 Publication	<1 %

---

74	<a href="http://dishut.jatimprov.go.id">dishut.jatimprov.go.id</a> Internet Source	<1 %
75	<a href="http://repository.usd.ac.id">repository.usd.ac.id</a> Internet Source	<1 %
76	Noeringhati, Anita. "Rekonstruksi Regulasi Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
77	Sev Rahmiyanti, Didit Prasetyo. "PENGARUH REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CILEGON TAHUN 2014-2018", Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan, 2020 Publication	<1 %
78	<a href="http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id">jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="http://pendidikan.co.id">pendidikan.co.id</a> Internet Source	<1 %
80	<a href="http://repositori.unsil.ac.id">repositori.unsil.ac.id</a> Internet Source	<1 %
81	<a href="http://repository.unipasby.ac.id">repository.unipasby.ac.id</a> Internet Source	<1 %

82	<a href="https://vdocuments.mx">vdocuments.mx</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="http://www.jurnalekonomi.unisla.ac.id">www.jurnalekonomi.unisla.ac.id</a> Internet Source	<1 %
84	Shabihah, Khansa. "Risiko Keuangan, Good Corporate Governance, dan Kinerja Keuangan pada Perbankan go Public di Bursa Efek Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
85	<a href="https://cms.depok.go.id">cms.depok.go.id</a> Internet Source	<1 %
86	<a href="http://ejournal.ipdn.ac.id">ejournal.ipdn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
87	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
88	<a href="http://repo.stie-pembangunan.ac.id">repo.stie-pembangunan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
89	<a href="http://repository.umy.ac.id">repository.umy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
90	Muhammad Bayu Dermawan Sarfa, Abdul Rasyid, Muhammad Ridwan Rumasukun, Zakaria Zakaria, Yaya Sonjaya. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi	<1 %

# Papua", The Journal of Business and Management Research, 2022

Publication

---

91 [andichairilfurqan.wordpress.com](http://andichairilfurqan.wordpress.com) <1 %  
Internet Source

---

92 [eprints.unm.ac.id](http://eprints.unm.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

93 [jdih.makassarkota.go.id](http://jdih.makassarkota.go.id) <1 %  
Internet Source

---

94 [repositori.usu.ac.id](http://repositori.usu.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

95 [repository.stiesia.ac.id](http://repository.stiesia.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

96 [repository.syekhnurjati.ac.id](http://repository.syekhnurjati.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

97 [repository.unej.ac.id](http://repository.unej.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

98 Parson Horota, Ida Ayu Purba Riani, Robert M. Marbun. "PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JAYAPURA", KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah), 2017 <1 %  
Publication

---

[eprints.ubhara.ac.id](http://eprints.ubhara.ac.id)

99

Internet Source

&lt;1 %

100

[jiss.publikasiindonesia.id](http://jiss.publikasiindonesia.id)

Internet Source

&lt;1 %

101

[jurnal.saburai.id](http://jurnal.saburai.id)

Internet Source

&lt;1 %

102

[repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)

Internet Source

&lt;1 %

103

[repository.upnvj.ac.id](http://repository.upnvj.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

104

Ali Kurniawan A. Suratinoyo, Harijanto Sabijono, Stanly Alexander. "ANALISIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM STRUKTUR PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MANADO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2013

Publication

&lt;1 %

105

Aprih Santoso. "IPTEKS PERHITUNGAN POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SEMARANG", Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat, 2019

Publication

&lt;1 %

106

Bagas Pradyastio, Selamat Rahmadi, Yohanes Vyn Amzar. "Analisis belanja daerah pada Kabupaten Induk dalam Provinsi Jambi", e-

&lt;1 %

---

107 Moch Anas Kurniawan, Dwi Cahyono, Achmad Syahfrudin. "Strategi Peningkatan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Perspektif Wajib Pajak", BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, 2020 <1 %

Publication

---

108 Nina Andriana. "PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2020 <1 %

Publication

---

109 Susiana Marbun, Erna Putri Manalu, Yois Nelsari Malau. "Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019", Jurnal Paradigma Ekonomika, 2022 <1 %

Publication

---

110 adoc.pub <1 %

Internet Source

---

111 doc-pak.undip.ac.id <1 %

Internet Source

---

112	<a href="http://edyraguapo.blogspot.com">edyraguapo.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
113	<a href="http://eprints.perbanas.ac.id">eprints.perbanas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
114	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
115	<a href="http://ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com">ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
116	<a href="http://jdih.dairikab.go.id">jdih.dairikab.go.id</a> Internet Source	<1 %
117	<a href="http://jdih.lampungtengahkab.go.id">jdih.lampungtengahkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
118	<a href="http://journal.stiem.ac.id">journal.stiem.ac.id</a> Internet Source	<1 %
119	<a href="http://jurnal-unsultra.ac.id">jurnal-unsultra.ac.id</a> Internet Source	<1 %
120	<a href="http://jurnal.magelangkota.go.id">jurnal.magelangkota.go.id</a> Internet Source	<1 %
121	<a href="http://jurnal.untag-sby.ac.id">jurnal.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
122	<a href="http://repo.undiksha.ac.id">repo.undiksha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
123	<a href="http://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %

124 repository.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

---

125 text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

---

126 Kusnadewi Lestari, Sri Rahayu, Yudi.  
"Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah,  
Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat  
Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan  
Temuan Audit BPK Terhadap Akuntabilitas  
Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada  
Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi  
Jambi)", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja,  
2019  
Publication

---

<1 %

127 Nisa', Indah Khoirun. "Peran Enterprise Risk  
Management dalam Peningkatan Firm Value  
Pada Perusahaan Bumn yang Go Public di  
Bursa Efek Indonesia", Universitas Islam  
Sultan Agung (Indonesia), 2023  
Publication

---

<1 %

128 Abunyani Abunyani, Parmadi Permadi, Erfit  
Erfit. "Analisis faktor yang mempengaruhi  
penerimaan pendapatan asli daerah  
Kabupaten Muaro Jambi", e-Jurnal Perspektif  
Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2019  
Publication

---

<1 %

129 Jefferdian. "Rekonstruksi Regulasi Yang Memengaruhi Budaya Hukum Pembayaran Pajak Daerah Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024  
Publication

---

130 Levina Ega Nariswari, Muchtolifah Muchtolifah. "Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun", Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 2022  
Publication

---

131 Ompusunggu, H. Novri. "Rekonstruksi Regulasi Pajak Bumi dan Bangunan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023  
Publication

---

132 Rizal Paruhuman Lubis, Riska Handayani. "PENGARUH INFLASI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MEDAN", Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2024  
Publication

---

133 Siti Maysyaroh, Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria. "ANALISIS SUMBANGAN

PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG", Jurnal Pariwisata,  
2022

Publication

---

134

Yulianti Dwi Astuti, Zakiyah Zahara, Banyamin Parubak. "BAURAN PROMOSI TERHADAP PEMBELIAN KEMBALI PRODUK ELEKTRONIK PT. DIVA", Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT), 2021

Publication

---

<1 %

135

[zombiedoc.com](http://zombiedoc.com)

Internet Source

---

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On